



KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN
PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA



Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi

LAPORAN KINERJA

Triwulan I Tahun 2026

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadiran Tuhan yang Maha Esa karena atas karunia dan rahmat-Nya penyusunan Laporan Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi Tahun 2026 dapat terselesaikan dengan baik. Laporan Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi ini merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan prinsip akuntabilitas dan transparansi Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi kepada publik sesuai ketentuan Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi disusun untuk melaporkan capaian kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi Periode Triwulan I terhadap target yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2026. Laporan Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi mempunyai peran sebagai alat kendali dan penilaian kualitas kinerja guna terwujudnya *good governance* di lingkungan Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi tahun 2026.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Triwulan I Tahun 2026, diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan dan akuntabel terkait pelaporan kinerja di lingkungan Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi. Melalui Laporan Kinerja ini diharapkan capaian kinerja pada periode berikutnya dapat lebih ditingkatkan, baik yang terkait pelaksanaan tugas dan fungsi maupun melalui penyempurnaan perencanaan kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi.

Kami menyadari bahwa laporan ini masih belum sepenuhnya sempurna. Oleh karena itu, kami terus berupaya untuk menyempurnakan sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dan penyajian Laporan Kinerja di masa mendatang.

Trenggalek, 15 April 2026
Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara
Prigi


Abdul Imran

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
RINGKASAN EKSEKUTIF	v
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Kedudukan	3
1.3. Tugas dan Fungsi	4
1.4. Aspek Strategis	5
1.5. Sistematika Penyajian Laporan	6
BAB II. PERENCANAAN KINERJA	7
2.1. Rencana Strategis 2025 – 2029	7
2.2. Arah Kebijakan dan Sasaran Kegiatan Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi ...	8
2.3. Indikator Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi	10
2.4. Target Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi	10
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA	13
BAB IV. PENUTUP	42
4.1. Kesimpulan	43
4.2. Tindak Lanjut Periode Sebelumnya	44
4.3. Rekomendasi Tindak Lanjut	44

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Target Sasaran Kegiatan (SK) dan Indikator Kinerja (IK) Tahun 2025	11
Tabel 2. Capaian Indikator Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi Triwulan I 2025	14
Tabel 3. Capaian IK "Penerimaan PNBP Non-SDA di Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi" Triwulan I 2025	16
Tabel 4. Realisasi Penerimaan PNBP Non-SDA Tahun 2025	16
Tabel 5. Capaian IK "Volume Produksi Perikanan Tangkap di Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi" Triwulan I 2025	20
Tabel 6. Capaian IK "Tingkat Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi" Triwulan I 2025	23
Tabel 7. Rekapitulasi Nilai Tingkat Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi Triwulan I 2025	24
Tabel 8. Perbandingan Capaian Tingkat Kinerja Triwulan I 2020 – 2025	24
Tabel 9. Capaian IK "Nilai Pengendalian Lingkungan Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi" Triwulan I 2025	27
Tabel 10. Capaian IK "Kapal Perikanan Izin Daerah yang Memenuhi Ketentuan" Triwulan I 2025	29
Tabel 11. Rekapitulasi Kapal Perikanan Izin Daerah yang Memenuhi Ketentuan	30
Tabel 12. Capaian IK "Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi" Triwulan I 2025	33
Tabel 13. Capaian IK "Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang Diumumkan pada SiRUP di Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi" Triwulan I 2025	35
Tabel 14. Hasil Penghitungan Persentase Rencana Umum Pengadaan Terumumkan di Lingkungan Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi Triwulan I 2025	36
Tabel 15. Capaian Indikator Kinerja Nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Triwulan I 2025	39
Tabel 16. Realisasi Anggaran berdasarkan Pelaksanaan Kegiatan Utama Triwulan I 2025	42
Tabel 17. Realisasi Anggaran berdasarkan Sasaran Kegiatan Triwulan I 2025	43

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktur Organisasi Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi	5
Gambar 2. Dashboard Kinerja Tahun 2025 Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi ...	13
Gambar 3. Realisasi PNBP Non-SDA per Jenis Jasa Triwulan I 2025.....	17
Gambar 4. Realisasi Penerimaan PNBP Non-SDA per Bulan Triwulan I 2025.....	17
Gambar 5. Perbandingan Capaian PNBP Triwulan I 2020 – 2025.....	18
Gambar 6. Volume Produksi per Alat Tangkap Triwulan I 2025	20
Gambar 7. Perbandingan Capaian Volume Produksi Triwulan I Tahun 2020 - 2025.....	21
Gambar 8. Perbandingan Nilai SKM Triwulan I Tahun 2021 – 2025.....	41

RINGKASAN EKSEKUTIF



Laporan Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi merupakan bentuk pertanggungjawaban instansi pemerintah atas akuntabilitas kinerja yang telah ditetapkan selama kurun waktu tertentu. Pelaporan kinerja ini mendukung sistem pemerintahan yang akuntabel, terukur, jelas, dan dapat dipercaya untuk mencapai pengelolaan yang bertanggung jawab. Laporan Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi Triwulan I 2026 memuat capaian kinerja atas pelaksanaan tugas dan fungsi Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi sesuai dengan visi, misi, dan sasaran strategis Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi tahun 2024-2029 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2026.

Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi pada tahun 2026 mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp 12.440.950,00 dengan realisasi anggaran sampai dengan triwulan I 2026 sebesar Rp 2.842.557.810,00 atau mencapai 22,85%.

Secara kinerja, Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi mendapatkan Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) sebesar 111,64% (Istimewa). Hal ini didukung oleh pencapaian indikator kinerja (IK) Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi, dimana pada triwulan I 2026 (berdasarkan Perjanjian Kinerja) terdapat 18 (delapan belas) IK dengan capaian $\geq 100\%$.

Nilai NPSS Triwulan I Tahun 2026 Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi secara detail disampaikan sebagaimana tabel berikut :

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target		Capaian		
			2026	TW I	TW I	%	
1	Nilai PNBPN Sektor Perikanan Tangkap Meningkat di Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi	1 Penerimaan PNBPN Non-SDA di Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi (Rp Juta)	1.601,27	273,28	301,90	110,47	
2	Produktivitas Perikanan Tangkap di Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi	2 Volume Produksi Perikanan Tangkap di Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi (Ton)	11.399,78	185,12	225,79	120	
3	Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi yang Optimal dan Bertanggung Jawab	3 Persentase Permohonan Pengusahaan yang Dianalisa dan/atau Dievaluasi di Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi (Persen)	100				
		4 Tingkat Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi (Nilai)	84,2	84,20	92,50	109,86	
		5 Tingkat Pelayanan Kesyahbandaran Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi (Persen)	40,5				
		6 Persentase Pengendalian Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi (Persen)	70				
		7 Nilai Pengendalian Lingkungan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi (Nilai)	33	33	84,6	120	

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target		Capaian	
			2026	TW I	TW I	%
4	Pengelolaan Awak Kapal Perikanan, Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan Berkelanjutan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi	8 Kapal Perikanan Izin Daerah yang Memenuhi Ketentuan (Kapal)	584	568	570	100,35
		9 Tingkat Pemenuhan Persyaratan Bekerja Awak Kapal Perikanan (Nilai)	0,28			
5	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik di Lingkungan Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi	10 Nilai PM Pembangunan ZI Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi (Nilai)	75,5			
		11 Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja (Persen)	86	86	100	116,28
		12 Nilai PM SAKIP Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi (Nilai)	88,2			
		13 Indeks Profesionalitas ASN Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi (Indeks)	84,5			
		14 Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang Diumumkan pada SIRUP di Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi (Persen)	77	77	100	120
		15 Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi (Persen)	82			
5	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik di Lingkungan Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi	16 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi (Nilai)	92,1			
		17 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi (Nilai)	71,75			
		18 Nilai Survei Kepuasan Masyarakat lingkup Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi	88,8	88,8	92,38	104,03



BAB I PENDAHULUAN



BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan instrumen yang digunakan oleh instansi pemerintah dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi yang terdiri dari komponen-komponen yang merupakan satu kesatuan yaitu perencanaan strategis, perencanaan kinerja, pengukuran dan pelaporan kinerja, serta evaluasi kinerja. Sistem Kinerja Instansi Pemerintah juga bertujuan untuk menciptakan pemerintahan yang baik dan terpercaya, meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur serta sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah untuk memperoleh informasi kinerja penting yang diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik serta untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan perbaikan akuntabilitas kinerja.

Sebagai wujud akuntabilitas dan kinerja, Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi. Pemenuhan kewajiban tersebut dijabarkan dengan menyiapkan, menyusun, dan menyampaikan laporan kinerja secara tertulis, periodik dan melembaga. Pelaporan kinerja dimaksudkan untuk mengkomunikasikan capaian kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi dalam satu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran serta menjelaskan keberhasilan dan kegagalan tingkat kinerja yang dicapai.

Program pengelolaan perikanan dan kelautan dilaksanakan melalui alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada tahun 2026 yang pertanggungjawabannya harus dilakukan secara akuntabel dan merupakan pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran berbentuk laporan yang berisi penerapan manajemen kinerja dan pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara realisasi dan target yang ditetapkan. Pengukuran kinerja ini dilakukan secara berkala (triwulanan dan tahunan). Pengukuran dan perbandingan kinerja dalam laporan kinerja harus cukup menggambarkan posisi kinerja instansi pemerintah. Indikator kinerja merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan terwujudnya kinerja, tercapainya hasil program dan hasil kegiatan.

Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi merupakan salah satu dari 22 (dua puluh dua) Pelabuhan Perikanan yang merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan dan pelayanan pemanfaatan sumber daya ikan, serta keselamatan operasional kapal perikanan. Guna mencapai tujuan pembangunan perikanan tangkap, Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi melaksanakan Program Pengelolaan Perikanan Tangkap, yang terdiri dari 5 (lima) kegiatan, yaitu :

- Pengelolaan Kapal Perikanan, Alat Penangkap Ikan, dan Pengawakan Kapal Perikanan.
- Pengelolaan Kepelabuhanan Perikanan
- Pengelolaan Perizinan dan Kenelayanan
- Pengelolaan Sumber Daya Ikan
- Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Perikanan Tangkap.

Dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari KKN menuju tercapainya pemerintahan yang bersih (*clean governance*) dan bertanggung jawab (*good governance*) diperlukan pertanggungjawaban dari penyelenggara negara yang dilaporkan pada akhir tahun anggaran dalam suatu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang ditindaklanjuti dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah mengatur bahwa segala pelaksanaan pembangunan oleh instansi pemerintah agar dilaporkan secara akuntabel sesuai dengan perjanjian kinerja yang ditetapkan meliputi pertanggungjawaban penggunaan anggaran, keberhasilan yang dihasilkan, kegagalan pelaksanaan serta permasalahan – permasalahan yang dihadapi yang disertai dengan tindak lanjut pelaksanaan di tahun mendatang. Tujuan dari pelaporan kinerja ini yakni : (1) untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya tercapai, (2) sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya. Wujud pelaporan kinerja dimaksud adalah Laporan Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi yang disusun setiap Tahun.

Berkaitan dengan hal tersebut, Laporan Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi Tahun 2026 disusun untuk mengukur pencapaian indikator kinerja sesuai dengan Perjanjian Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Tahun 2026 dalam mewujudkan misi dan tujuan yang telah ditetapkan. Laporan Kinerja ini adalah salah satu bentuk media pertanggungjawaban kinerja sesuai dengan perjanjian kinerja dan anggaran yang telah dialokasikan terhadap kegiatan yang telah direncanakan dan dilaksanakan sehingga prinsip pemerintahan yang bersih dan bertanggung jawab (*good governance*) bisa diwujudkan.

1.2. Kedudukan

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Perikanan Tangkap, Pelabuhan Perikanan adalah unit pelaksana teknis di bidang pelabuhan perikanan yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Direktur Jenderal Perikanan Tangkap. Dasar hukum pengelolaan pelabuhan perikanan antara lain :

- Undang-Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Tahun 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1983 tentang Pembinaan Kepelabuhanan;
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan;
- Peraturan Pemerintah RI Nomor 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku di Kementerian Kelautan dan Perikanan;
- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan dan Perikanan;
- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kepelabuhanan Perikanan;
- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 3 Tahun 2013 tentang Kesyahbandaran di Pelabuhan Perikanan;
- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 66 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Perikanan Tangkap;
- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 64 Tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 108 Tahun 2020 tentang Peta Jabatan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

1.3. Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan, Pelabuhan Perikanan mempunyai fungsi pemerintahan dan pengusaha guna mendukung kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran.

Fungsi pemerintahan merupakan fungsi untuk melaksanakan pengaturan, pembinaan, pengendalian, pengawasan, seerta keamanan dan keselamatan operasional kapal perikanan di pelabuhan. Fungsi pemerintahan Pelabuhan Perikanan sebagai berikut:

- Pelayanan tambat dan labuh kapal perikanan;
- Pelayanan pembinaan dan pengendalian mutu pada kegiatan penangkapan ikan;
- Pengumpulan data tangkapan hasil perikanan;
- Pelaksanaan kegiatan operasional kapal perikanan, yang meliputi pengaturan keberangkatan, kedatangan, dan kegiatan kapal perikanan di pelabuhan perikanan;
- Pelaksanaan keselamatan dan keamanan operasional kapal perikanan dan membantu pengendalian sumber daya ikan;
- Pelaksanaan pengendalian lingkungan di pelabuhan perikanan, yang meliputi kebersihan, keamanan, ketertiban, keindahan, dan keselamatan kerja;
- Pelaksanaan publikasi operasional pelabuhan perikanan, hasil pelayanan sandar dan labuh kapal perikanan dan kapal pengawas perikanan;
- Pelaksanaan pemantauan wilayah pesisir dan wisata bahari;
- Fasilitasi tempat pelaksanaan pengawasan dan pengendalian sumber daya ikan;
- Fasilitasi tempat pelaksanaan penyuluhan dan pengembangan masyarakat nelayan;
- Fasilitasi tempat pelaksanaan fungsi karantina ikan;
- Fasilitasi tempat publikasi hasil riset kelautan dan perikanan;
- Fasilitasi tempat pelaksanaan fungsi kesehatan;
- Fasilitasi tempat pelaksanaan fungsi kepabeanan dan/atau;
- Fasilitasi tempat pelaksanaan fungsi keimigrasian;
- Fungsi lainnya terkait dengan pengelolaan perikanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Fungsi pengusaha pada pelabuhan perikanan merupakan fungsi untuk melaksanakan pengusaha berupa penyediaan dan/atau pelayanan jasa kapal perikanan dan jasa terkait di pelabuhan perikanan. Fungsi pengusaha pelabuhan perikanan yaitu :

- Pelayanan bongkar muat;
- Pelayanan pengolahan hasil perikanan;
- Pemasaran dan distribusi ikan;
- Penggunaan dan pemanfaatan fasilitas di pelabuhan perikanan;
- Pelayanan docking dan galangan kapal perikanan;
- Pelayanan logistik dan perbekalan awak kapal perikanan dan kapal perikanan;
- Penyelenggaraan wisata bahari;
- Fasilitasi tempat pelayanan lembaga keuangan; dan/atau
- Penyediaan dn/atau pelayanan jasa lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Adapun susunan organisasi Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 51/KEPMEN-KP/2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 108/KEPMEN-KP/2020 tentang Peta Jabatan dan Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagai berikut :



Gambar 1. Struktur Organisasi Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi

1.4. Aspek Strategis

Aspek Strategis Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi dalam mendukung kebijakan pembangunan perikanan tangkap Tahun 2025 – 2029 sesuai dengan renstra DJPT adalah sebagai berikut :

- Meningkatnya produktivitas sektor kelautan dan perikanan;
- Meningkatnya reformasi birokrasi KKP yang berkualitas;

1.5. Sistematika Penyajian Laporan

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Laporan Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi disusun dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan, menguraikan tentang latar belakang, menyajikan informasi umum tentang Laporan Kinerja yang menjadi tanggung jawab sebuah instansi pemerintah, penjelasan secara umum suatu organisasi serta bagan organisasi dan informasi tentang alur capaian kinerja yang meliputi perencanaan, pengukuran kinerja, pelaporan, dan evaluasi kinerja selama waktu tertentu (waktu pelaporan).

Bab II Perencanaan Kinerja, menjelaskan gambaran singkat mengenai visi, misi, dan rencana hasil yang akan dicapai (tujuan dan sasaran strategis, indikator kinerja, dan targetnya) dalam Rencana Jangka Menengah (RPJM/Renstra), Rencana Kerja Tahunan (RKT/Renja) dan Penetapan Kinerja (PK) pada periode triwulan tertentu.

Bab III Akuntabilitas Kinerja, menyajikan uraian hasil pengukuran kinerja, evaluasi kinerja, dan analisis akuntabilitas kinerja, termasuk didalamnya menguraikan secara sistematis perbandingan data kinerja secara memadai, keberhasilan/kegagalan, hambatan/kendala, dan permasalahan yang dihadapi, serta langkah-langkah antisipatif yang akan diambil. Selain itu, disajikan pula akuntabilitas keuangan dengan cara menyajikan rencana dan realisasi anggaran bagi pelaksanaan tupoksi atau tugas-tugas lainnya dalam rangka mencapai sasaran / tujuan organisasi yang telah ditetapkan serta langkah-langkah peningkatan dan efisiensi.

Bab IV Penutup, pada bagian ini diuraikan kesimpulan secara umum tentang capaian kinerja organisasi, tindak lanjut rekomendasi periode sebelumnya, serta rekomendasi tindak lanjut yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

Lampiran, pada bagian ini dilampirkan dokumen perjanjian kinerja, penghargaan yang diperoleh, serta dokumen kinerja lainnya.



BAB II

PERENCANAAN KINERJA



BAB II. PERENCANAAN KINERJA

2.1. Rencana Strategis 2025 – 2029

Indonesia, sebagai salah satu negara maritim terbesar dunia, memiliki potensi kelautan dan perikanan yang melimpah. Hal tersebut merupakan modal dasar yang sangat besar untuk mewujudkan cita-cita luhur bangsa Indonesia sebagai bangsa yang maju, berdaulat, adil, dan makmur serta sebagai sebuah bangsa yang tangguh dalam hal politik, keamanan sosial, dan budaya/peradaban bahari sebagai poros maritim dunia menuju Indonesia Emas 2045 sebagaimana tertuang di dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025 – 2029.

Kegiatan pembangunan subsektor perikanan tangkap di Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap (DJPT) merupakan salah satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari pembangunan kelautan dan perikanan secara keseluruhan dan sejalan dengan Visi Presiden dan Wakil Presiden tahun 2025-2029 “Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045” , serta mendukung pencapaian delapan misi Asta Cita sebagai agenda prioritas nasional untuk mewujudkan tercapainya sasaran pembangunan yaitu pertumbuhan ekonomi 8%, penurunan tingkat kemiskinan 0%, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagaimana amanat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025- 2029 yang telah ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025.

Pencapaian Indonesia Emas 2045 merupakan sebuah keniscayaan apabila menempatkan sektor kelautan dan perikanan sebagai episentrum pembangunan nasional, mengingat potensi sumber daya perairan yang sangat besar. Orientasi pembangunan sudah semestinya beralih ke sektor kelautan dan perikanan dengan menjadikan sektor ini sebagai poros penggerak pembangunan dan perekonomian nasional, transformasi pendekatan pembangunan yang sebelumnya hanya berorientasi pada peningkatan produksi menjadi pendekatan pembangunan secara terukur dan berkelanjutan dengan mempertimbangkan daya dukung lingkungan serta berorientasi pada permintaan pasar yang menempatkan ekologi sebagai panglima. Transformasi pendekatan diimplementasikan ke dalam lima arah kebijakan pembangunan Ekonomi Biru yaitu: 1) Memperluas kawasan konservasi laut; 2) Penangkapan ikan terukur berbasis kuota; 3) Pengembangan perikanan budi daya di laut, pesisir, dan darat yang berkelanjutan; 4) Pengawasan dan pengendalian wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil; dan 5) Pembersihan sampah plastik di laut melalui gerakan partisipasi nelayan.

Untuk menjalankan peran strategis tersebut, visi visi Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap adalah “Terwujudnya Tata Kelola Perikanan Tangkap yang Partisipatif, Berkelanjutan, dan Menyejahterakan Nelayan” untuk mewujudkan “Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045” . Visi tersebut merupakan prinsip utama yang selanjutnya diterjemahkan kedalam misi, strategi, dan upaya-upaya pembangunan yang diarahkan untuk mewujudkan kesejahteraan nelayan. Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap melaksanakan misi Asta Cita sebagai agenda prioritas nasional untuk mewujudkan tercapainya sasaran pembangunan yaitu pertumbuhan ekonomi 8%, penurunan tingkat kemiskinan 0%, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia mengacu pada tugas, fungsi dan wewenang yang telah dimandatkan dalam peraturan perundang-undangan dengan fokus misi Asta Cita ke-2: Swasembada pangan dan ekonomi biru.

Menjabarkan misi Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, maka tujuan pembangunan perikanan tangkap adalah:

1. Menjamin kelestarian sumber daya ikan melalui penerapan kebijakan Penangkapan Ikan Terukur (PIT) dan pengawasan berbasis wilayah pengelolaan;
2. Meningkatkan produktivitas dan efisiensi usaha penangkapan ikan melalui pemanfaatan teknologi, modernisasi armada, dan integrasi sistem logistik hasil tangkapan;
3. Mengembangkan infrastruktur pelabuhan perikanan sebagai simpul layanan terpadu dan pusat pertumbuhan ekonomi kelautan;
4. Memperkuat kelembagaan, perlindungan, dan pemberdayaan nelayan, termasuk nelayan kecil, perempuan, dan pemuda untuk meningkatkan kesejahteraan dan daya saing;
5. Meningkatkan tata kelola perikanan tangkap yang transparan dan akuntabel, melalui penguatan regulasi, perizinan, pemantauan, serta sistem data dan informasi perikanan.

2.2. Arah Kebijakan dan Sasaran Kegiatan Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi

Dalam rangka mendukung tercapainya tujuan pembangunan perikanan tangkap, Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi menerapkan strategi dengan menetapkan Sasaran Kegiatan yang dapat digunakan sebagai acuan selama lima tahun sebagai suatu outcome/impact dari program kegiatan yang dilaksanakan.

Sasaran Kegiatan Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi merupakan bagian dari Sasaran Kegiatan Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap untuk memberikan fokus pada penyusunan kegiatan dan alokasi sumber daya organisasi dalam operasional organisasi, dengan pengukuran & penilaian Rencana Kerja Tahun 2024 9 kinerja berbasis Balanced Scorecard (BSC). Sasaran Kegiatan Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi berdasarkan tujuan yang ingin dicapai dengan masing-masing Indikator Kinerja sebagai berikut:

1. Sasaran Kegiatan 1 **"Nilai PNBP Sektor Perikanan Tangkap Meningkat di Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi"** , untuk mendukung Sasaran Program Level 1 Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap "Meningkatnya Produksi Perikanan Tangkap secara Berkelanjutan" dengan Indikator Kinerja: Penerimaan PNBP Non-SDA di Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi;
2. Sasaran Kegiatan 2 **"Produktivitas Perikanan Tangkap di Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi Meningkat"** , untuk mendukung Sasaran Program Level 1 Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap "Meningkatnya Produksi Perikanan Tangkap secara Berkelanjutan" , dengan Indikator Kinerja: Volume Produksi Perikanan Tangkap di Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi;
3. Sasaran Kegiatan 3 **"Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi yang Optimal dan Bertanggung Jawab"** , untuk mendukung Sasaran Program Level 1 Tangkap "Meningkatnya Produksi Perikanan Tangkap secara Berkelanjutan" , dengan Indikator Kinerja:
 - Persentase Permohonan Pengusahaan yang Dianalisa dan/atau Dievaluasi di Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi;
 - Tingkat Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi;
 - Tingkat Pelayanan Kesyahbandaran Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi;
 - Persentase Pengendalian Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi; Nilai Pengendalian Lingkungan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi
4. Sasaran Kegiatan 4 **"Pengelolaan Awak Kapal Perikanan, Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan Berkelanjutan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi"** , untuk mendukung Sasaran Program Level 1 "Meningkatnya Produksi Perikanan Tangkap secara Berkelanjutan" , dengan Indikator Kinerja:
 - Kapal Perikanan Izin Daerah yang Memenuhi Ketentuan;
 - Tingkat Pemenuhan Persyaratan Bekerja Awak Kapal Perikanan.
5. Sasaran Kegiatan 5 **"Terwujudnya Layanan Dukungan Manjerial yang Baik di Lingkungan Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi"** , untuk mendukung Sasaran

Program Level 1 “Meningkatnya Produksi Perikanan Tangkap secara Berkelanjutan” , dengan Indikator Kinerja:

- Nilai PM Pembangunan ZI Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi;
- Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi;
- Nilai PM SAKIP Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi;
- Indeks Profesionalitas ASN Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi;
- Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang Diumumkan pada SIRUP di Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi;
- Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi;
- Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi;
- Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi; dan
- Nilai Survei Kepuasan Masyarakat lingkup Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi

2.3. Indikator Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi

Indikator kinerja merupakan nilai atau karakteristik tertentu yang digunakan untuk mengukur *output* atau *outcome*. Indikator kinerja juga mendefinisikan sebagai alat ukur yang digunakan untuk menentukan derajat keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan.

Perjanjian kinerja merupakan instrumen pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja. Tujuan umum Perjanjian Kinerja adalah 1) Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah; 2) Sebagai dasar penilaian keberhasilan / kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi; 3) Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur; 4) Sebagai dasar pemberian penghargaan dan atau sanksi (reward and punishment). Penetapan Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi tahun 2026 secara rinci dapat dilihat pada **Lampiran 1**.

2.4. Target Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi

Indikator kinerja merupakan alat ukur pencapaian pencapaian tujuan / sasaran atau indikasi atau ciri-ciri bahwa kinerja tercapai. Target adalah target kinerja atas indikator, sedangkan program/kegiatan adalah cara untuk mencapai target kinerja.

Target kinerja dalam hal ini diartikan sebagai target kinerja sasaran dengan dilengkapi indikator kinerja yang akan dicapai. Target kinerja sasaran menunjukkan tingkat sasaran kegiatan kinerja spesifik yang akan dicapai meliputi program dan kegiatan dalam periode waktu yang telah ditetapkan.

Target Sasaran Kegiatan (SK) dan Indikator Kinerja (IK) Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi Tahun 2026 dapat dilihat pada Tabel dibawah ini.

Tabel 1. Target Sasaran Kegiatan (SK) dan Indikator Kinerja (IK) Tahun 2026

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja		Target Tahun 2026
1	Nilai PNBP Sektor Perikanan Tangkap Meningkat di Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi	1	Penerimaan PNBP Non SDA di Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi (Rp Juta)	1.601,27
2	Produktivitas Perikanan Tangkap di Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi	2	Volume Produksi Perikanan Tangkap di Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi (Ton)	11.399,78
3	Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi yang Optimal dan Bertanggung Jawab	3	Persentase Permohonan Pengusahaan yang Dianalisa dan/atau Dievaluasi di Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi (Persen)	100
		4	Tingkat Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi (Nilai)	84,2
		5	Tingkat Pelayanan Kesyahbandaran Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi (Persen)	40,5
		6	Persentase Pengendalian Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi (Persen)	70
		7	Nilai Pengendalian Lingkungan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi (Nilai)	33
4	Pengelolaan Awak Kapal Perikanan, Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan Berkelanjutan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi	8	Kapal Perikanan Izin Daerah yang Memenuhi Ketentuan (Kapal)	584
		9	Tingkat Pemenuhan Persyaratan Bekerja Awak Kapal Perikanan (Nilai)	0,28
5	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik di Lingkungan Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi	10	Nilai PM Pembangunan ZI Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi (Nilai)	75,5
		11	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja (Persen)	86
		12	Nilai PM SAKIP Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi (Nilai)	88,2
		13	Indeks Profesionalitas ASN Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi (Indeks)	84,5
		14	Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang Diumumkan pada SIRUP di Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi (Persen)	77
		15	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi (Persen)	82

		16	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi (Nilai)	92,1
		17	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi (Nilai)	71,75
		18	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat lingkup Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi (Nilai)	88,8

Target kinerja dalam hal ini diartikan sebagai target kinerja sasaran dengan dilengkapi indikator kinerja yang akan dicapai. Target kinerja sasaran menunjukkan tingkat sasaran kegiatan kinerja spesifik yang akan dicapai meliputi program dan kegiatan dalam periode waktu yang telah ditetapkan. Dalam melaksanakan capaian kinerja dari target yang telah ditetapkan, terdapat beberapa kegiatan pendukung untuk mencapai target indikator kinerja yang telah ditentukan sebelumnya. Adapun kegiatan pendukung tersebut terdapat pada dokumen Rencana Aksi sebagaimana terdapat pada **Lampiran 2**.



BAB III

AKUNTABILITAS

KINERJA



BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja Organisasi

Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban unit kerja untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan misi unit kerja dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik. Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi harus dapat dipertanggungjawabkan pencapaiannya, baik itu berupa keberhasilan maupun kegagalan. Hal tersebut sebagai bagian dari perwujudan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Prinsip akuntabilitas dimaksudkan untuk mewujudkan tata pemerintahan yang bertanggung jawab dimana instansi pemerintah dan aparaturnya harus dapat mempertahankan pelaksanaan kewenangan yang diberikan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Kegiatan pembangunan perikanan tangkap tahun 2026 sebagaimana Perjanjian Kinerja (PK) Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi menitikberatkan pada 5 (lima) Sasaran Kegiatan dan 18 (delapan belas) Indikator Kinerja untuk menunjang pencapaian visi dan misi Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap.



Gambar 2. Dashboard Kinerjaku Tahun 2026 Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi

Capaian kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi triwulan I tahun 2026 memiliki kategori "**ISTIMEWA**", ditandai dengan Nilai Capaian Sasaran Strategis (NPSS) sebesar **111,64%**. Capaian ini merupakan gambaran nilai kinerja organisasi secara keseluruhan.

Pada triwulan I tahun 2026, seluruh indikator kinerja atau sebanyak 8 (delapan) indikator kinerja dengan pengukuran capaian bersifat triwulan tercapai ($\geq 100\%$).

Sedangkan 10 (sepuluh) indikator kinerja lainnya bersifat semester dan tahun. Adapun rekapitulasi capaian indikator kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi tahun 2026 dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 2. Capaian Indikator Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi Triwulan I 2026

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target		Capaian	
			2026	TW I	TW I	%
1	Nilai PNBP Sektor Perikanan Tangkap Meningkat di Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi	1 Penerimaan PNBP Non-SDA di Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi (Rp Juta)	1.540,58	293,63	355,61	100,98
2	Produktivitas Perikanan Tangkap di Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi	2 Volume Produksi Perikanan Tangkap di Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi (Ton)	17.054	800	943,61	117,95
3	Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi yang Optimal dan Bertanggung Jawab	3 Persentase Permohonan Pengusahaan yang Dianalisa dan/atau Dievaluasi di Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi (Persen)	100			
		4 Tingkat Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi (Nilai)	84	84	94,58	112,60
		5 Tingkat Pelayanan Kesyahbandaran Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi (Persen)	46			
		6 Persentase Pengendalian Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi (Persen)	70			
		7 Nilai Pengendalian Lingkungan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi (Nilai)	30,10	30,10	84,39	280,37
4	Pengelolaan Awak Kapal Perikanan, Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan Berkelanjutan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi	8 Kapal Perikanan Izin Daerah yang Memenuhi Ketentuan (Kapal)	502	490	492	100,41
		9 Tingkat Pemenuhan Persyaratan Bekerja Awak Kapal Perikanan (Nilai)	0,26			
5	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik di Lingkungan Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi	10 Nilai PM Pembangunan ZI Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi (Nilai)	75,5			
		11 Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja (Persen)	85	85	100	117,65
		12 Nilai PM SAKIP Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi (Nilai)	88			
		13 Indeks Profesionalitas ASN Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi (Indeks)	87			
		14 Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang Diumumkan pada SIRUP di	76	76	100	131,57

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target		Capaian	
			2026	TW I	TW I	%
5	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik di Lingkungan Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi	Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi (Persen)				
		15 Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi (Persen)	81			
		16 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi (Nilai)	92			
		17 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi (Nilai)	71,5			
		18 Nilai Survei Kepuasan Masyarakat lingkup Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi	88,50	88,50	93,17	105,28

3.2. Analisa Capaian Kinerja

Periode triwulan I tahun 2026, Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi telah melaksanakan kegiatan yang menjadi tugas dan fungsinya dalam rangka mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Evaluasi dan analisis pada setiap Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja diuraikan sebagai berikut :

3.2.1. Sasaran Kegiatan (SK) 1 – Nilai PNBP Sektor Perikanan Tangkap Meningkat di Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi

Indikator Kinerja (IK) pada SK 1 yaitu Penerimaan PNBP Non-SDA di Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi.

Indikator Kinerja (IK) 1 – Penerimaan PNBP Non-SDA di Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi

Nilai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sektor Kelautan dan Perikanan adalah pungutan yang dibayar oleh orang pribadi/badan dengan memperoleh manfaat langsung maupun tidak langsung atas layanan/pemanfaatan sumber daya dan hak yang diperoleh negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang menjadi penerimaan pemerintah pusat diluar penerimaan perpajakan dan hibah dan dikelola dalam mekanisme anggaran pendapatan dan belanja negara di sektor kelautan dan perikanan. PNBP PPN Prigi terdiri atas penerimaan umum dan fungsional.

Penghitungan nilai PNBP sektor perikanan tangkap di tahun berjalan sesuai PP Nomor 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNBP yang berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan periode penilaian tahunan.

Tabel 3. Capaian IK "Penerimaan PNBP Non-SDA di Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi" Triwulan I 2026

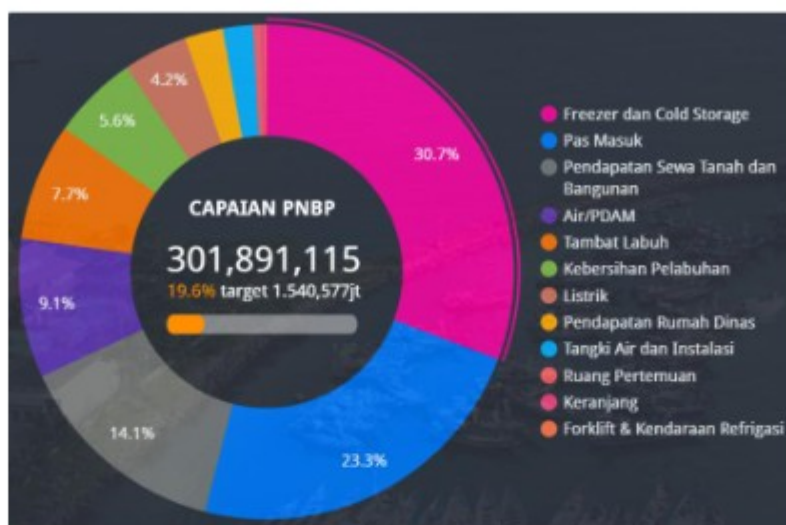
SK 1	Nilai PNBP Sektor Perikanan Tangkap Meningkat di Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi								
IK 1	Penerimaan PNBP Non SDA di Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi								
Realisasi Tahun 2021 - 2025					Target & Realisasi Tahun 2026			Renstra	
TW I Tahun 2021	TW I Tahun 2022	TW I Tahun 2023	TW I Tahun 2024	TW I Tahun 2025	Target TW I 2026	Realisasi TW I 2026	% Realisasi thd Target	Target Renstra	% terhadap Target Renstra
143,99	339,30	421,44	344,57	355,61	273,28	301,9	110,47%	1.601.272	18,85%

Pada triwulan I tahun 2026, capaian indikator kinerja "Penerimaan PNBP Non-SDA di Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi" sebesar Rp 301,9 juta atau sebesar 110,47% dari target triwulan I tahun 2026. Penerimaan PNBP Non-SDA terdiri dari PNBP Fungsional dan PNBP Umum. PNBP fungsional terdiri atas pendapatan penggunaan sarana prasarana sesuai TUSI dan pendapatan jasa pelabuhan perikanan. Sedangkan, PNBP umum terdiri atas pendapatan dari penjualan peralatan dan mesin, pendapatan pengembalian belanja pegawai, pendapatan penerimaan kembali belanja barang, serta pendapatan jasa lainnya. Penerimaan PNBP per jenis jasa dapat dilihat pada Tabel dibawah ini.

Tabel 4. Realisasi Penerimaan PNBP Non-SDA Tahun 2026

ANGGARAN	JENIS JASA	TARGET 2026 (Rp)	REALISASI S.D. TW I 2026 (Rp)
PNBP FUNGSIONAL			
425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, Bangunan	174.979.000	42.508.750
425151	Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai TUSI	622.737.000	108.856.327
	Pelayanan Penggunaan Tanah dan/atau Bangunan	8.000.000	1.500.000
	Pelayanan Penggunaan Peralatan dan Mesin	586.283.000	99.466.312
	Pelayanan Penggunaan Transportasi	-	375.000
	Pendapatam Rumah Negara Tapak	28.454.000	7.515.015
425621	Pendapatan Jasa Pelabuhan Perikanan	803.556.000	150.526.038
	Pelayanan Tambat untuk Kapal Perikanan	151.958.000	6.868.791
	Pelayanan Labuh untuk Kapal Perikanan	92.450.000	60.546.038
	Pelayanan Jasa Pengadaan Air / PDAM	85.360.000	13.699.830
	Pelayanan Jasa Pas Masuk Harian Sekali Masuk	276.550.000	15.392.000
	Pelayanan Jasa Pas Masuk Berlangganan	50.790.000	27.700.000
	Pelayann Jasa Kebersihan Pelabuhan	94.328.000	27.313.700
	Pemakaian Listrik	52.120.000	8.380.700
PNBP UMUM			
425122	Pendapatan dan Penjualan Peralatan dan Mesin	-	-
425699	Pendapatan Jasa Lainnya	-	-
425911	Pendapatan Pengembalian Belanja Pegawai YTL	-	-
425912	Pendapatan Penerimaan Kembali Belanja Barang YTL	-	-
JUMLAH PNBP FUNGSIONAL DAN UMUM		1.601.272.000	301.891.115
TARGET PNBP TW I 2025		273.280.000	
% CAPAIAN PNBP TW I 2025		110,47%	

Persentase realisasi PNBP Non-SDA per Jenis Jasa di Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi dapat dilihat pada Grafik dibawah ini.



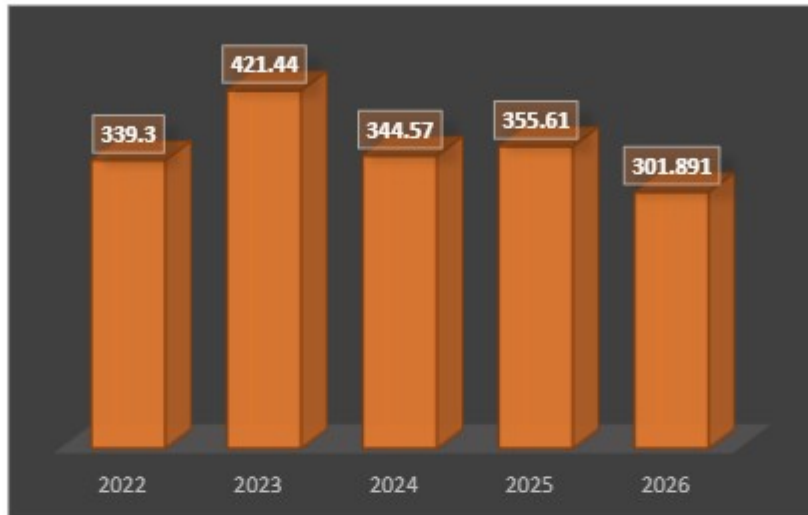
Gambar 3. Realisasi PNBP Non-SDA per Jenis Jasa Triwulan I 2026

Realisasi PNBP Non-SDA terbesar pada pendapatan penggunaan peralatan dan mesin (*freezer dan cold storage*) sebesar Rp 92.781.412,- (30,7% dari total PNBP tahun 2025). Pendapatan penggunaan peralatan dan mesin (*freezer dan cold storage*) tetap menjadi penyumbang terbesar untuk realisasi PNBP Non-SDA pada triwulan I Tahun 2026. Hal tersebut didukung oleh adanya pembekuan produk samping ikan patin (*belly*, kulit, dan kepala) secara kontinu / tidak bergantung pada musim. Selain produk tersebut, juga terdapat produk lainnya seperti layur, cumi-cumi dan gurita. Petugas operator penggunaan peralatan dan mesin (*freezer dan cold storage*) melaksanakan pelayanan setiap saat menyesuaikan dengan permintaan pengguna jasa sehingga mendukung pelaksanaan pelayanan tersebut.



Gambar 4. Realisasi Penerimaan PNBP Non-SDA per Bulan Triwulan I 2026

Penerimaan PNBP Non-SDA tertinggi terjadi pada bulan Januari 2025. Pendapatan tersebut tertinggi diperoleh dari pendapatan penggunaan peralatan dan mesin (*freezer* dan *cold storage*) sebesar Rp. 37.113. 532,- (30,4%), kemudian disusul dengan pendapatan sewa lahan dan bangunan sebesar Rp. 28.723.750,- (23,5%) dan pendapatan pas masuk sebesar Rp. 26.092.000,- (21,3 %).



Gambar 5. Perbandingan Capaian PNBP Triwulan I 2022 – 2026

Berdasarkan data capaian PNBP Non-SDA 5 (lima) tahun terakhir, triwulan I tahun 2026 mendapatkan pendapatan terendah dibandingkan 5 (lima) tahun sebelumnya. Adapun faktor yang mempengaruhi penurunan capaian PNBP Non SDA triwulan I 2026 dibandingkan tahun-tahun sebelumnya adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan penggunaan peralatan dan mesin (*freezer* dan *cold storage*) Triwulan I Tahun 2026 (Rp. 92,78 juta) mengalami penurunan jika disbanding pendapatan Triwulan I Tahun 2025 (Rp. 152,32 juta) dikarenakan belum musim ikan;
2. Pendapatan jasa tambat labuh Triwulan I Tahun 2026 (Rp. 23,14 juta) menurun disbanding Triwulan I Tahun 2025 (Rp. 29,29 juta) dikarenakan belum musim ikan dan banyak kapal yang melakukan perbaikan/dock di luar kawasan PPN Prigi;
3. Pendapatan pas masuk Triwulan I Tahun 2026 (Rp. 70,19 jt) menurun dibanding Triwulan I Tahun 2025 karena menurunnya aktivitas pelaku usaha di kawasan pelabuhan akibat belum musim ikan;
4. Pendapatan kebersihan kawasan pelabuhan Triwulan I Tahun 2026 (Rp. 16,93 juta) menurun dibandingkan Triwulan I Tahun 2025 karena jasa kebersihan bangunan permanen tertutup dan warung/kios di kawasan pelabuhan dibayar saat jatuh tempo pembayaran sewa tanah dan/atau bangunan. Untuk pendapatan kebersihan kolam juga mengalami penurunan dikarenakan banyak kapal yang melakukan perbaikan/dock di luar area kolam labuh;

5. Pendapatan penggunaan trays pada Triwulan I Tahun 2026 (Rp. 759 ribu) menurun jika dibandingkan dengan Triwulan I Tahun 2025 (Rp. 2,1 juta)

Faktor penentu keberhasilan pencapaian Indikator Kinerja Penerimaan PNBPN Non-SDA antara lain :

1. Komitmen para petugas pelayanan jasa;
2. Peningkatan pendapatan pemanfaatan tanah dan/atau bangunan pada Triwulan I tahun 2026 (Rp. 42,51 juta) dibandingkan pada Triwulan I tahun 2025. Hal tersebut karena ada penambahan investor /mitra usaha baru pada Triwulan I tahun 2026;
3. Peningkatan pemahaman dan kesadaran pengguna jasa untuk memenuhi kewajiban pembayaran PNBPN.

Dibandingkan dengan target Renstra, capaian penerimaan PNBPN Triwulan I 2026 mencapai sebesar 18,85%. Sedangkan jika dibandingkan dengan capaian Satker lain (PPN Palabuhanratu), capaian Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi adalah 51,82% dimana capaian Triwulan I tahun 2026 adalah sebesar Rp.582,57 juta

Menindaklanjuti permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian PNBPN triwulan I, maka kegiatan yang dilaksanakan adalah melaksanakan rekonsiliasi petugas pelayanan jasa dengan bendahara penerimaan PNBPN, serta melaksanakan monitoring dan evaluasi penggunaan jasa.

Untuk mendukung keberhasilan pencapaian kinerja, diperlukan sumberdaya pendukung yang tepat dan efisien. Sumber daya pendukung meliputi 2 (dua) hal yaitu anggaran dan sumber daya manusia (SDM). Anggaran untuk mendukung tercapainya indikator kinerja ini sebesar Rp 43.360.000,00. Sampai dengan triwulan I, belum terdapat serapan anggaran. Sedangkan efisiensi anggaran akan dihitung pada akhir tahun anggaran. Pencapaian indikator kinerja ini didukung oleh 13 (tiga belas) orang SDM dengan 8 (delapan) jenis pelayanan jasa yang diberikan.

Program / kegiatan yang menunjang keberhasilan / kegagalan dalam pencapaian indikator kinerja ini yaitu pelabuhan perikanan UPT pusat dan perintis yang dikelola dan operasional sesuai standar melalui kegiatan peningkatan pelayanan di pelabuhan perikanan dalam rangka pasca produksi dan PIT serta pelayanan perusahaan pelabuhan perikanan.

3.2.2. Sasaran Kegiatan (SK) 2 – Produktivitas Perikanan Tangkap di Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi Meningkat

Indikator Kinerja (IK) pada SK 2 yaitu Volume Produksi Perikanan Tangkap di Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi.

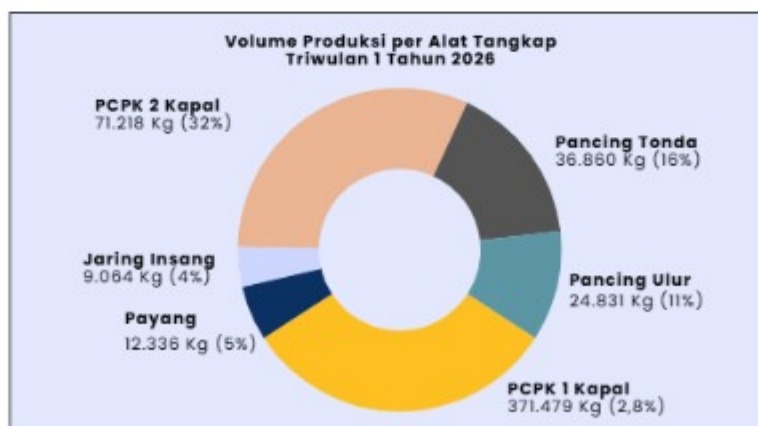
Indikator Kinerja (IK) 2 – Volume Produksi Perikanan Tangkap di Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi

Volume produksi perikanan tangkap merupakan jumlah produksi perikanan tangkap yang didaratkan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi. Pengumpulan data produksi dilakukan oleh petugas Enumerator. Pendataan dilaksanakan dengan pencacahan lengkap menggunakan form monitoring data produksi harian. Data yang telah terkumpul kemudian diolah oleh pengolah, diverifikasi, dan divalidasi serta dilaporkan secara berkala.

Tabel 5. Capaian IK "Volume Produksi Perikanan Tangkap di Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi" Triwulan I 2026

SK 2		Produktivitas Perikanan Tangkap di Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi Meningkat								
IK 2		Volume Produksi Perikanan Tangkap di Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi								
Realisasi Tahun 2021 - 2025					Target & Realisasi Tahun 2026			Renstra		
TW I Tahun 2021	TW I Tahun 2022	TW I Tahun 2023	TW I Tahun 2024	TW I Tahun 2025	Target TW I 2026	Realisasi TW I 2026	% Realisasi thd Target	Target Renstra	% terhadap Target Renstra	
1.717	1.713,62	1.298,11	2.520,95	943,61	185,12	225,79	121,97%	11.399,78	1,98%	

Capaian indikator kinerja "Volume Produksi Perikanan Tangkap di Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi" pada triwulan I 2026 sebesar 225,79 Ton atau 121,97% dari target triwulan I 2026. Pada triwulan I 2026 masih belum memasuki musim puncak penangkapan ikan, sehingga hasil tangkapan masih cenderung rendah. Volume produksi per alat tangkap Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi triwulan I tahun 2026 dapat dilihat pada Gambar dibawah ini.



Gambar 6. Volume Produksi per Alat Tangkap Triwulan I 2026

Hasil tangkapan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi pada triwulan I 2026 didominasi oleh hasil tangkapan dengan alat tangkap Pukat Cincin Pelagis Kecil dengan Satu Kapal (31,67%) dengan jenis ikan dominan Tongkol Lisong (18,36% dari total hasil tangkapan).



Gambar 7. Perbandingan Capaian Volume Produksi Triwulan I Tahun 2021 - 2026

Perbandingan capaian volume produksi perikanan tangkap dari tahun 2021-2026 menunjukkan tren menurun. Dibandingkan dengan volume produksi perikanan tangkap pada triwulan I tahun 2021-2025, volume produksi triwulan I 2026 merupakan volume produksi terendah. Persentase penurunan volume produksi sebesar 76,07% - 91,04%. Penurunan ini disebabkan adanya factor oseanografi yang tidak mendukung kegiatan penangkapan ikan, dimana pada triwulan 1 tahun 2026 kondisi cuaca ekstrem dan gelombang tinggi. Hal tersebut berpengaruh langsung terhadap penurunan frekuensi kunjungan kapal sebanyak sebesar 1.395 kali (62,25%) serta penurunan produktivitas kapal perikanan.

Jika dibandingkan dengan target Renstra, capaian volume produksi perikanan tangkap triwulan I 2026 sebesar 1,98%. Sedangkan dibandingkan dengan capaian Satker lain (PPN Palabuhanratu), capaian Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi sebesar 20,05%. Hal ini disebabkan adanya penambahan jumlah armada yang cukup banyak dengan ukuran diatas 30 GT di Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu, sehingga sangat berpengaruh terhadap peningkatan volume produksi.

Faktor pendukung tercapainya target indikator kinerja “Volume Produksi Perikanan Tangkap” pada triwulan I 2026 yaitu adanya upaya pendataan volume produksi perikanan tangkap dengan sistem *shift* 24 jam untuk meminimalisir terjadinya *data unrecorded* / *data*

loosing, serta dilaksanakannya penghitungan dan analisis data potensi perikanan tangkap.

Sedangkan faktor penghambat dalam pencapaian indikator kinerja “Volume Produksi Perikanan Tangkap” antara lain :

- Adanya penurunan jumlah armada kapal perikanan sebanyak 141 unit (24,14%). Selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir, jumlah armada menunjukkan tren menurun. Selain itu, pada tahun 2026 merupakan jumlah armada paling sedikit. Hal ini disebabkan oleh penurunan produktivitas kapal, penurunan kelayakan usaha, dan berpindah pelabuhan pangkalan mendekati daerah penangkapan;
- Penurunan frekuensi kunjungan kapal sebesar 62,25% serta peningkatan *failed trip* sebesar 0,79%;
- Faktor oseanografi yang tidak mendukung upaya penangkapan seperti curah hujan tinggi, gelombang tinggi, dan kecepatan angin tinggi. Upaya penangkapan bersifat fluktuatif, tinggi rendahnya upaya penangkapan dipengaruhi oleh kondisi sumber daya ikan secara keseluruhan untuk meminimalisir risiko kerugian operasional penangkapan.

Upaya yang akan dilaksanakan yaitu monitoring dan evaluasi terkait sistem pendataan produksi perikanan tangkap serta validasi data hasil tangkapan ikan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi. Sedangkan upaya yang telah dilaksanakan yaitu validasi data internal terkait kesesuaian hasil tangkapan dengan alat tangkap yang digunakan, serta pengelohan dan validasi data statistik perikanan tangkap dan validasi satu data.

Pada tahun 2026, tidak terdapat dukungan anggaran dalam pencapaian indikator kinerja ini. Dalam pencapaian indikator kinerja ini, didukung oleh 13 (tiga belas) orang SDM yang terdiri dari 8 (delapan) orang enumerator, 3 (tiga) orang pengolah data, dan 2 (dua) orang validator. Penggunaan excel terformat yang terintegrasi dengan *dashboard* Operasional dan Sistem Informasi Capaian Kinerja Pelabuhan Perikanan (SiCakep) mendukung efisiensi SDM dalam pengolahan data produksi perikanan tangkap.

Program kegiatan yang menunjang keberhasilan / kegagalan pencapaian IK 2 yaitu program layanan data dan informasi dengan kegiatan penyelenggaraan, pengolahan, dan validasi data statistik lingkup Ditjen Perikanan Tangkap.

3.2.3. Sasaran Kegiatan (SK) 3 – Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi yang Optimal dan Bertanggungjawab

Indikator Kinerja (IK) pada SK 3 yaitu Persentase Permohonan Pengusahaan yang Dianalisa dan/atau Dievaluasi di Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi; Tingkat Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi; Tingkat Pelayanan Kesyahbandaran Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi; Persentase Pengendalian Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Perikanan Nusantara prigi; dan Nilai Pengendalian Lingkungan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi.

Indikator Kinerja (IK) 3 – Persentase Permohonan Pengusahaan yang Dianalisa dan/atau Dievaluasi di Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi

Persentase permohonan pengusahaan yang dianalisa dan/atau dievaluasi dihitung berdasarkan jumlah usulan pengusahaan baru/perpanjangan yang dianalisa dan/atau dievaluasi dibandingkan dengan total jumlah usulan pengusahaan yang masuk di Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi. Pengukuran capaian indikator kinerja ini bersifat tahunan, sehingga belum dilakukan pengukuran dan membandingkan capaian pada triwulan I 2025.

Indikator Kinerja (IK) 4 – Tingkat Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi

Tingkat kinerja pelabuhan perikanan merupakan upaya untuk menilai tingkat kinerja operasional yang didasarkan atas ketentuan kriteria teknis dan operasional kelas pelabuhan perikanan (sesuai SK Ditjen Perikanan Tangkap No 20/KEP-DJPT/2015 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Operasional Pelabuhan Perikanan, perubahan atas SK Dirjen Perikanan Tangkap Nomor 432/DJPT.3/OT.220.D3/I/2018). Sebagai bagian dari kegiatan manajemen untuk menilai kinerja Pelabuhan Perikanan. Acuan dalam meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat perikanan. Ruang lingkup meliputi : 1) Administrasi dan sistem informasi; 2) Fasilitas pelabuhan perikanan; 3) Pelayanan umum; serta 4) Investasi dan industri.

Tabel 6. Capaian IK "Tingkat Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi" Triwulan I 2026

SK 3		Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi yang Optimal dan Bertanggung Jawab							
IK 4		Tingkat Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi							
Realisasi Tahun 2021 – 2025					Target & Realisasi Tahun 2026			Renstra	
TW I Tahun 2021	TW I Tahun 2022	TW I Tahun 2023	TW I Tahun 2024	TW I Tahun 2025	Target TW I 2026	Realisasi TW I 2026	% Realisasi thd Target	Target Renstra	% terhadap Target Renstra
87,75	93,00	91,67	93,83	94,58	84	92,50	110,09%	84	110,12%

Rata-rata nilai tingkat kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi pada triwulan I 2025 yaitu 92,50 atau 110,09% dari target triwulan I 2026. Capaian nilai tingkat kinerja

bersifat fluktuatif yang sangat dipengaruhi oleh 27 (dua puluh tujuh) kriteria penilaian. Capaian tingkat kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi per bulan dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 7. Rekapitulasi Nilai Tingkat Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi Triwulan I 2026

No	Bulan	Nilai Tingkat Kinerja Pelabuhan Perikanan	Kategori
1	Januari	93,00	Sangat Baik
2	Februari	90,75	Sangat Baik
3	Maret	93,75	Sangat Baik
Rata - Rata Nilai Tingkat Kinerja		92,50	Sangat Baik

Pada triwulan I 2026, nilai tingkat kinerja terendah pada bulan Februari. Hal ini disebabkan adanya penurunan volume produksi dan frekuensi kunjungan kapal yang berpengaruh terhadap daya tampung kolam.



Tabel 8. Perbandingan Capaian Tingkat Kinerja Triwulan I 2021 – 2026

Capaian Tingkat Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi periode tahun 2021 – 2026 sangat fluktuatif. Dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya (2025), capaian rata-rata tingkat kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi triwulan I 2026 mengalami penurunan nilai sebesar 2,08 atau 2,20%. Penurunan capaian terjadi pada beberapa kriteria. Kriteria produksi perikanan merupakan kriteria yang mengalami penurunan paling signifikan. Kriteria ini juga berhubungan langsung dengan kriteria kapasitas daya tampung kolam. Sehingga pada saat volume produksi mengalami penurunan, maka akan menyebabkan penurunan pada nilai kriteria daya tampung kolam. Selain kriteria tersebut, juga terdapat penurunan pada kriteria jumlah investor. Pada triwulan I 2026 jumlah investor di Pelabuhan perikanan tidak sebanyak triwulan I 2025.

Kendala yang dihadapi pada triwulan I 2026 yaitu adanya proses peralihan penilaian tingkat kinerja ke aplikasi PIPP versi baru. Terdapat sebagian data yang tidak terekam pada saat data sudah diinput, baik pada versi lama maupun baru. Data yang tidak terekam mencakup e-logbook, kapasitas daya tampung kolam, dan pemanfaatan lahan Pelabuhan. Sehingga pada triwulan I 2026, nilai tingkat kinerja merupakan gabungan antara nilai aplikasi maupun manual.

Jika dibandingkan dengan target Renstra, capaian triwulan I 2026 sebesar 110,12%. Sedangkan dibandingkan dengan capaian Satker lain (PPN Pelabuhanratu) dengan nilai tingkat kinerja pelabuhan sebesar 88, capaian Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi sebesar 105,11%.

Faktor pendukung tercapainya target indikator tingkat kinerja "Tingkat Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi" yaitu :

- Adanya kontribusi dan komitmen dari setiap kelompok kerja yang melakukan tugasnya serta melaporkan dan menginput data pada sistem Pusat Informasi Pelabuhan Perikanan (PIPP);
- Adanya monitoring dan evaluasi serta validasi dan supervisi secara berkala terhadap input data serta capaian evaluasi kinerja pada aplikasi PIPP;
- Adanya tindak lanjut terhadap seluruh rekomendasi hasil monitoring evaluasi dan supervisi pelaksanaan input data PIPP.

Sedangkan faktor penghambat pencapaian target ini yaitu adanya proses peralihan penilaian tingkat kinerja ke aplikasi PIPP versi baru. Terdapat Sebagian data yang tidak terekam pada saat data sudah diinput, baik pada versi lama maupun baru.

Upaya yang akan dilaksanakan untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi yaitu menyusun jadwal pelaksanaan input data sesuai aplikasi versi baru sehingga dapat meningkatkan efektifitas dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi. Selain itu, melaksanakan koordinasi secara *online* dengan tim PIPP pusat terkait kendala pada aplikasi.

Kegiatan yang telah dilaksanakan pada triwulan I 2026 antara lain pelaksanaan operasional PIPP di pelabuhan perikanan, melaksanakan monitoring dan evaluasi serta validasi terhadap pelaksanaan input data.

Pada tahun 2026, tidak terdapat dukungan anggaran dalam pencapaian indikator kinerja ini. Dalam pencapaian IK 4, didukung oleh 12 (dua belas) orang operator Pusat Informasi Pelabuhan Perikanan. Penggunaan dashboard Operasional Pelabuhan PPN Prigi mendukung efisiensi waktu dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan input data PIPP.

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian Indikator Kinerja Tingkat Kinerja Pelabuhan yaitu pelabuhan perikanan UPT pusat dan perintis yang dikelola dan operasional sesuai standar melalui kegiatan pelaksanaan tata kelola dan operasional PIPP di pelabuhan perikanan.

Indikator Kinerja (IK) 5 – Tingkat Pelayanan Kesyahbandaran di Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi

Tingkat pelayanan kesyahbandaran merupakan indikator yang menunjukkan pelayanan kesyahbandaran yang dipengaruhi oleh 3 (tiga) komponen, yaitu :

- 1) Jumlah Persetujuan Berlayar yang diterbitkan (bobot 40%) - Dihitung berdasarkan jumlah kapal yang diterbitkan persetujuan berlayarnya dibagi dengan jumlah kapal aktif;
- 2) Jumlah Surat Tanda Bukti Laporan Kedatangan (STBLK) yang diterbitkan (bobot 40%) - Dihitung berdasarkan kapal yang diterbitkan STBLK dibandingkan jumlah kapal aktif;
- 3) Jumlah Sertifikat Hasil Tangkapan Ikan (SHTI) yang diterbitkan (20%) – Formula penghitungan = $(100 - (\text{jumlah permintaan verifikasi SHTI yang diterbitkan} : \text{jumlah SHTI yang diterbitkan}) \times 100\%)$.

Pengukuran indikator kinerja ini bersifat tahunan, sehingga pada triwulan I belum dapat dilakukan pengukuran capaian.

Indikator Kinerja (IK) 6 – Persentase Pengendalian Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi

Sesuai dengan Permen KP Nomor 8 Tahun 2012, pelabuhan perikanan merupakan tempat yang terdiri atas daratan dan perairan sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan sistem bisnis perikanan yang digunakan sebagai tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh, dan/atau bongkar muat ikan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang perikanan. Dalam rangka menunjang fungsi pelabuhan perikanan, setiap pelabuhan perikanan memiliki fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang perikanan. Dalam rangka menunjang fungsi pelabuhan perikanan, setiap pelabuhan perikanan memiliki fasilitas yang terdiri dari fasilitas pokok, fasilitas fungsional, dan fasilitas penunjang. Pelabuhan perikanan yang telah beroperasi dapat dilakukan pengembangan sesuai dengan kebutuhannya. Indikator kinerja "Persentase Pengendalian Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi" dihitung berdasarkan persentase pengembangan fasilitas dibandingkan dengan *masterplan/ draft* perubahan *masterplan*.

Indikator Kinerja ini bersifat tahunan, sehingga belum dapat dilakukan pengukuran capaian dan belum dapat membandingkan dengan target tahunan, capaian tahun sebelumnya, target Renstra, dan capaian Satker lain.

Indikator Kinerja (IK) 7 – Nilai Pengendalian Lingkungan Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kepelabuhanan Perikanan, penyelenggaraan pelabuhan perikanan yang mengoperasikan pelabuhan perikanan harus 1) bertanggungjawab sepenuhnya atas pengoperasian pelabuhan perikanan yang bersangkutan; dan 2) menaati ketentuan peraturan perundang undangan di bidang perikanan dan lingkungan.

Penilaian pengendalian lingkungan pelabuhan perikanan berdasarkan aplikasi Sistem Informasi dan Monitoring Tata Kelola Lingkungan Pelabuhan Perikanan (SELARASKAN). SELARASKAN merupakan sistem informasi berbasis WEB yang berfungsi sebagai alat monitoring tata kelola lingkungan di pelabuhan perikanan yang berisikan program lingkungan hingga hasil pencapaian kualitas lingkungan yang diperbarui berkala dan dicantumkan dalam bentuk score pelabuhan. Indikator hasil meliputi kebersihan pelabuhan, kualitas udara, kualitas air, penggunaan listrik, penggunaan air, pengelolaan limbah B3, dan kepatuhan regulasi.

Tabel 9. Capaian IK "Nilai Pengendalian Lingkungan Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi" Triwulan I 2025

SK 3 Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi yang Optimal dan Bertanggung Jawab									
IK 7 Nilai Pengendalian Lingkungan Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi									
Realisasi Tahun 2020 - 2024					Target & Realisasi Tahun 2026			Renstra	
TW I Tahun 2021	TW I Tahun 2022	TW I Tahun 2023	TW I Tahun 2024	TW I Tahun 2025	Target TW I 2026	Realisasi TW I 2026	% Realisasi thd Target	Target Renstra	% terhadap Target Renstra
-	-	0,4	90,22	84,39	33	84,6	256,36%	33	256,36%

Capaian IK "Nilai Pengendalian Lingkungan Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi" triwulan I 2026 sebesar 84,6 atau 256,36% dari target triwulan I 2026. Capaian nilai pengendalian lingkungan PPN Prigi memiliki predikat "Sangat Baik", hal ini disebabkan seluruh indikator program *mandatory* dan program *voluntary* tata kelola pengendalian lingkungan dipenuhi dan dilaksanakan.

Jika dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya (2025), capaian triwulan I 2025 kenaikan sebesar 0,249% (100,249%). Pada triwulan I 2025 kenaikan skor pada sebagian besar indikator program wajib (*mandatory*) seperti pengukuran kualitas udara,

pengukuran kualitas air kolam pelabuhan, kebersihan pelabuhan, pemilahan dan pengolahan sampah, serta indikator lainnya. Jika dibandingkan dengan target Renstra, capaian triwulan I 2025 sebesar 256,36%. Sedangkan jika dibandingkan dengan capaian Satker lain (PPN Palabuhanratu), capaian PPN Prigi sebesar 103,765% dimana nilai SELARASKAN PPN Palabuhanratu sebesar 81,53.

Faktor pendukung tercapainya indikator kinerja nilai pengendalian lingkungan pada triwulan I 2026 antara lain :

1. Mayoritas kegiatan pada program mandatory, voluntary dan indikator hasil telah dicukupi data dukungnya dengan maksimal baik periode harian, mingguan maupun bulanan.
2. Petugas selalu memantau perkembangan migrasi database aplikasi selaraskan ke aplikasi terbaru sehingga lebih memahami alur pelaporan dengan baik dan benar pada aplikasi terbaru Selaraskan V2.1.

Faktor penghambat atau kendala yang dihadapi dalam pencapaian indikator kinerja ini antara lain :

1. Berdasarkan hasil penilaian pusat pada Triwulan I 2026 bulan Januari skor awal 92,9 setelah diverifikasi skor menjadi 88,09. Bulan Februari 83,5 skor menjadi 79,53. Bulan Maret 87,7 skor menjadi 86,19. Ada beberapa data dukung di program mandatory dan voluntary yang ditolak oleh verifikator pusat karena detail data dukung pada geotag kurang lengkap;
2. Menurunnya intensitas pelaksanaan kegiatan patroli energi, patroli keamanan dermaga dan himbauan keselamatan di kapal, sehingga berdampak pada pengumpulan data dukung yang kurang maksimal;
3. Belum dilakukan penyaluran limbah B3 yang dihasilkan di kawasan PPN Prigi kepada pihak pengelola yang menangani B3;
4. Efisiensi anggaran berdampak pada pelaksanaan surveillance ISO:14001 dan uji laboratorium kualitas lingkungan pelabuhan (air/udara/sedimen) sehingga belum dapat dilaksanakan dengan maksimal (di triwulan I hanya dilaksanakan uji mandiri dengan alat sederhana).

Upaya yang akan dilaksanakan pada periode selanjutnya antara lain

1. Melaksanakan monitoring dan evaluasi kepada tim yang terlibat dalam seluruh kegiatan pengelolaan lingkungan untuk lebih detail dalam melaporkan data dukung/foto (lokasi sebelum dan sesudah diusahakan sama, peta geotag tertera pada foto, petugas yang melaksanakan kegiatan dengan jelas terlihat pada foto);
2. Akan dilaksanakan penyerapan anggaran untuk melakukan uji kualitas lingkungan pelabuhan melalui laboratorium yang ditunjuk;

3. Memonitoring dan mengevaluasi secara berkala terhadap input data yang telah dilaksanakan, sehingga diharapkan dapat mengontrol capaian indikator-indikator penilaian yang dapat dikendalikan.

Untuk mendukung keberhasilan pencapaian kinerja, diperlukan sumberdaya pendukung yang tepat dan efisien. Sumberdaya pendukung meliputi 2 (dua) hal yaitu anggaran dan sumber daya manusia (SDM). Anggaran untuk mendukung tercapainya indikator kinerja ini sebesar Rp 62.795.000,00. Serapan anggaran sampai dengan triwulan I 2026 adalah Rp. 7.505.000,- (11,95%). Pencapaian indikator kinerja ini didukung oleh 8 (delapan) orang SDM berdasarkan Surat Tugas Tim Pengelola Aplikasi Selaraskan pada Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi. Pemantauan dan pengumpulan *evidence* kegiatan *voluntary* dan *mandatory* disampaikan melalui WAG Selaraskan, sehingga memudahkan koordinasi antara petugas pelaksana dengan petugas input data pada aplikasi.

Program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan indikator kinerja ini yaitu program pelabuhan perikanan UPT pusat dan perintis yang dikelola dan operasional sesuai standar melalui kegiatan K5 di pelabuhan perikanan, gerakan cinta laut dalam rangka mendukung pengendalian lingkungan, pemantauan pengelolaan lingkungan, dan *surveillance* ISO 14001:2015.

3.2.4. Sasaran Kegiatan (SK) 4 – Pengelolaan Awak Kapal Perikanan, Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan Berkelanjutan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi

Indikator Kinerja (IK) pada SK 4 yaitu Kapal Perikanan Izin Daerah yang Memenuhi Ketentuan dan Tingkat Pemenuhan Persyaratan Bekerja Awak Kapal Perikanan.

Indikator Kinerja (IK) 8 – Kapal Perikanan Izin Daerah yang Memenuhi Ketentuan

Indikator Kinerja (IK) "Kapal Perikanan Izin Daerah yang Memenuhi Ketentuan" merupakan indikator yang menunjukkan jumlah dokumen kapal perikanan (Sertifikat Kelaikan Kapal Perikanan) yang diterbitkan oleh Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi.

Tabel 10. Capaian IK "Kapal Perikanan Izin Daerah yang Memenuhi Ketentuan" Triwulan I 2026

SK 4		Pengelolaan Awak Kapal Perikanan, Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan Berkelanjutan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi							
IK 7		Kapal Perikanan Izin Daerah yang Memenuhi Ketentuan (Kapal)							
Realisasi Tahun 2021 – 2025					Target & Realisasi Tahun 2026			Renstra	
TW I Tahun 2021	TW I Tahun 2022	TW I Tahun 2023	TW I Tahun 2024	TW I Tahun 2025	Target TW I 2026	Realisasi TW I 2026	% Realisasi thd Target	Target Renstra	% terhadap Target Renstra
-	-	132	347	492	568	570	100,35%	584	97,60%

Capaian indikator kinerja triwulan I 2026 sebanyak 570 dokumen dari target 568 dokumen atau 100,35% dari target yang ditetapkan. Sesuai dengan formula penghitungan pada manual IKU, capaian pada triwulan I 2025 merupakan akumulasi dari capaian tahun 2023 (337 kapal), tahun 2024 (149 kapal), tahun 2025 (76 kapal), dan triwulan 1 tahun 2026 (8 kapal)

Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi melayani penerbitan Sertifikat Kelaikan Kapal Perikanan (SKKP) di Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi dan pelabuhan binaan (UPT PPP Tamperan, UPT PPP Popoh, IPPP Tambakrejo, UPT PPP Pondokdadap, UPT PPP Muncar, dan Pelabuhan Masami / Tanjungwangi).

Tabel 11. Rekapitulasi Kapal Perikanan Izin Daerah yang Memenuhi Ketentuan

No	Pelabuhan Binaan / Pelabuhan	Jumlah Penerbitan Dokumen				Jumlah
		2023	2024	2025	TW 1 2026	
1	PP. Prigi	27	31	6	1	38
2	PP. Tamperan	25	2	7	4	65
3	PP. Popoh	7	8	7		22
4	PP. Tambakrejo	4	-	0		4
5	PP. Pondokdadap	142	63	19		224
6	PP. Muncar	62	45	37	3	147
7	PP. Masami / Tanjungwangi	70	-	0		70
Jumlah KPID yang memenuhi ketentuan		337	149	76	8	570

Jika dibandingkan dengan dengan capaian tahun sebelumnya, capaian penerbitan SKKP menunjukkan tren menurun. Hal ini sebabkan oleh adanya perbedaan mekanisme penerbitan SKKP pada tahun 2023 menggunakan mekanisme surat edaran dan reguler. Pada tahun 2024 penerbitan SKKP hanya menggunakan mekanisme reguler. Sedangkan pada tahun 2025 selain menggunakan mekanisme reguler, penerbitan perpanjangan SKKP juga terfasilitasi melalui mekanisme Surat Edaran. Untuk tahun 2026 perpanjangan SKKP maupun penerbitan SKKP baru semua melalui mekanisme reguler yaitu melalui pemeriksaan kelaikan kapal.

Jika dibandingkan dengan target Renstra, capaian indikator kinerja ini pada triwulan I 2026 sebesar 97,60%. Sedangkan jika dibandingkan dengan capaian satker lain (Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu), capaian Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi sebesar 185,065 %, dimana capaian PPN Palabuhanratu sebanyak 308 (tiga ratus delapan) dokumen.

Faktor pendukung tercapainya indikator kinerja ini adanya syahbandar di UPTD binaan yang sekaligus bertugas sebagai Petugas Pemeriksa Kelaikan Kapal Perikanan sehingga bisa mempercepat proses pemeriksaan kelaikan kapal perikanan. Sedangkan

faktor penghambat / kendala dalam pencapaian indikator kinerja ini yaitu kurangnya kesadaran pemilik kapal dalam melengkapi aspek laik laut, laik tangkap dan laik simpan, sehingga menghambat proses pemeriksaan dan penerbitan SKKP. Selain itu adanya efisiensi anggaran, dimana tidak adanya anggaran untuk perjalanan pemeriksaan kelaikan kapal di pelabuhan perikanan binaan yang pada pelabuhan perikanan binaan tersebut tidak terdapat Petugas Pemeriksa Kelaikan Kapal Perikanan.

Upaya yang akan dilaksanakan untuk mengatasi factor penghambat/kendala dalam penerbitan Sertifikat Kelaikan Kapal Perikanan antara lain:

1. mengoptimalkan peran syahbandar di UPTD binaan yang telah mengikuti diklat petugas kelaikan agar proses pemeriksaan kelaikan kapal dapat dilaksanakan secara lebih cepat dan efektif
2. dilakukan pengaturan prioritas pemeriksaan serta pemanfaatan sumber daya yang tersedia secara maksimal untuk menjaga kualitas pelayanan.
3. Untuk mengatasi keterbatasan anggaran yang berdampak pada terbatasnya mobilisasi pemeriksaan kelaikan, akan dilakukan koordinasi dan penjadwalan pemeriksaan secara lebih terencana, serta mendorong efisiensi pelaksanaan kegiatan agar pemeriksaan kelaikan di UPTD binaan tetap dapat berjalan secara optimal.

Untuk mendukung keberhasilan pencapaian kinerja, diperlukan sumberdaya pendukung yang tepat dan efisien. Sumber daya pendukung meliputi 2 (dua) hal yaitu anggaran dan Sumber Daya Manusia (SDM). Efisiensi penggunaan anggaran akan dilakukan pengukuran pada akhir tahun anggaran. Dalam pencapaian indikator kinerja ini didukung oleh 9 (sembilan) orang SDM yang terdiri atas 7 (tujuh) orang petugas kelaikan kapal, 1 (satu) orang verifikator, dan Kepala Pelabuhan.

Indikator Kinerja (IK) 9 – Tingkat Pemenuhan Persyaratan Bekerja Awak Kapal Perikanan

Indikator Kinerja (IK) "Tingkat Pemenuhan Persyaratan Bekerja Awak Kapal Perikanan" merupakan indikator yang menunjukkan pemenuhan persyaratan bekerja awak kapal perikanan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 33 Tahun 2021, serta Surat Edaran Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor B. 2541/MEN-KP/XII/2024. Tujuan implementasi indikator ini adalah untuk menjamin kepatuhan regulasi serta meningkatkan kesejahteraan dan keselamatan awak kapal perikanan. Pengukuran indikator kinerja ini bersifat tahunan, sehingga sampai dengan triwulan I tahun 2026 belum dapat dilakukan analisis dan evaluasi.

3.2.5. Sasaran Kegiatan (SK) 5 – Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik di Lingkungan Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi

Terdapat 9 (sembilan) Indikator Kinerja (IK) pada Sasaran Kegiatan (SK) 5 sebagai berikut :

- 1) Nilai PM Pembangunan ZI Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi;
- 2) Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi;
- 3) Nilai PM SAKIP Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi;
- 4) Indeks Profesionalitas ASN Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi;
- 5) Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang Diumumkan pada SIRUP di Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi;
- 6) Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi;
- 7) Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi;
- 8) Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi;
- 9) Nilai Survei Kepuasan Masyarakat lingkup Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi.

Indikator Kinerja (IK) 10 – Nilai PM Pembangunan ZI Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi

Zona integritas adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan wilayah bebas dari korupsi/ wilayah birokrasi bersih dan melayani melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Indikator kinerja Nilai PM Pembangunan ZI Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi merupakan penilaian pembangunan ZI menuju WBK yang mencakup 6 (enam) area pengungkit dan 2 (dua) area komponen hasil yang mengacu kepada Juknis Pengawasan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani. Data dukung berupa Lembar Kerja Evaluasi (LKE). Pengukuran indikator kinerja ini bersifat tahunan, sehingga sampai dengan triwulan I tahun 2026 belum dapat dilakukan analisis dan evaluasi.

Indikator Kinerja (IK) 11 – Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi

Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja merupakan jumlah rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal kepada Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap berdasarkan LHP (terbatas pada audit, reviu, dan

evaluasi baik bentuk surat maupun bab) yang terbit pada triwulan IV 2024 s.d. triwulan I 2026 yang telah ditindaklanjuti (berstatus proses dan/ atau tuntas) oleh Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap yang menjadi objek pengawasan. Formula penghitungan yaitu persentase jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti dibandingkan dengan jumlah rekomendasi yang diberikan.

Tabel 12. Capaian IK "Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi" Triwulan I 2025

SK 5 Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik di Lingkungan Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi									
IK 11 Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi (Kapal)									
Realisasi Tahun 2021 - 2025					Target & Realisasi Tahun 2026			Renstra	
TW I Tahun 2021	TW I Tahun 2022	TW I Tahun 2023	TW I Tahun 2024	TW I Tahun 2025	Target TW I 2026	Realisasi TW I 2025	% Realisasi thd Target	Target Renstra	% terhadap Target Renstra
-	-	100	100	100	86	100	116,28%	86	116,28%

Capaian indikator kinerja Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi pada triwulan I 2026 yaitu 100% atau 116,28% dari target triwulan I 2026. Dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya dan dengan capaian Satker lain (PPN Palabuhanratu), capaian triwulan I 2026 memiliki nilai yang sama. Sedangkan jika dibandingkan dengan target Renstra, capaian indikator kinerja ini sebesar 116,28%.

Faktor pendukung tercapainya indikator kinerja ini yaitu adanya tindak lanjut seluruh temuan dan/atau saran pada Laporan Hasil Pengawasan yang dilaksanakan tepat waktu. Secara umum, tidak terdapat kendala dalam pencapaian target indikator kinerja ini.

Untuk mendukung keberhasilan pencapaian indikator kinerja ini, diperlukan sumberdaya pendukung yang tepat dan efisien. Sumber daya pendukung meliputi 2 (dua) hal yaitu anggaran dan sumber daya manusia (SDM). Untuk tahun 2026 kegiatan IKU ini tidak mendapatkan alokasi anggaran. Kegiatan koordinasi dan konsultasi tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan dilakukan secara *online* dan pemenuhan dokumen diunggah pada *google drive* sehingga lebih efektif dan efisien, baik dari segi sumber daya manusia maupun waktu penyelesaiannya.

Program / kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan dalam pencapaian indikator kinerja ini yaitu layanan manajemen keuangan melalui kegiatan penyelesaian dan evaluasi tindak lanjut LHA di bidang keuangan dan perbendaharaan.

Indikator Kinerja (IK) 12 – Nilai PM SAKIP Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi

Indikator Penilaian Mandiri SAKIP adalah indikator yang mengukur implementasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah melalui penilaian mandiri dengan aspek penilaian antara lain perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi kinerja. Nilai PM SAKIP Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi dihitung berdasarkan Permen PAN RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi SAKIP. Terdapat 4 aspek penilaian didalam evaluasi atas implementasi SAKIP, yakni perencanaan kinerja (30%), pengukuran kinerja (30%), pelaporan kinerja (15%), dan evaluasi kinerja (25%). Nilai PM SAKIP merupakan ukuran perkembangan implementasi SAKIP di Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi. Pengukuran indikator kinerja ini bersifat tahunan, sehingga sampai dengan triwulan I tahun 2026 belum dapat dilakukan analisis dan evaluasi. Pada tahun 2026, terdapat penambahan anggota tim pengelola kinerja lingkup Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi, sehingga diperlukan upaya peningkatan pengetahuan tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Indikator Kinerja (IK) 13 – Indeks Profesionalitas ASN Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi

Indeks Profesionalitas ASN merupakan ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatannya (Permen PAN dan RB No. 38 Tahun 2018). Terdapat penyesuaian / perubahan cara perhitungan IP ASN sesuai dengan surat BKN 006/B-BM.02.01/SD/C/2023 tanggal 15 September 2023 tentang pengukuran IP-ASN. Perubahan formula penghitungan sebagai berikut :

- Perhitungan bobot pada dimensi kualifikasi mengalami penyesuaian dengan mencantumkan persyaratan pendidikan minimal dengan jenis jabatan yang diduduki;
- Diklat 20 JP dihitung secara proporsional;
- Penghitungan bobot dimensi kinerja mengalami penyesuaian menjadi predikat kinerja;
- Riwayat hukuman disiplin 1 (satu) tahun terakhir.

Pengukuran indikator kinerja ini bersifat semester, sehingga sampai dengan triwulan I tahun 2026 belum dapat dilakukan analisis dan evaluasi.

Indikator Kinerja (IK) 14 – Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang Diumumkan pada SIRUP di Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi

Rencana Umum Pengadaan (RUP) adalah instrumen penting dalam meningkatkan transparansi pengelolaan keuangan pemerintah yang dilaksanakan melalui proses pengadaan barang/jasa. Melalui RUP, pemerintah mengumumkan secara terbuka secara terbuka pemaketan pengadaan yang akan dilaksanakan oleh Kementerian Kelautan dan

Perikanan. Pengukuran terhadap persentase RUP yang diumumkan pada Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) dapat mempresentasikan kualitas perencanaan PBJ di Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi. Nilai pada indikator ini diperoleh didapatkan dari persentase nilai pengadaan barang/jasa yang diumumkan pada SiRUP dibandingkan dengan nilai pagu pengadaan unit kerja mandiri. Pagu pengadaaan merupakan pagu program dikurangi belanja pegawai dan pagu non pengadaan. Adapun ketentuan mengenai Persentase Rencana Umum Pengadaan dijabarkan pada Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Pasal 11 Ayat (1).

Tabel 13. Capaian IK "Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang Diumumkan pada SiRUP di Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi" Triwulan I 2026

SK 5		Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik di Lingkungan Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi							
IK 14		Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang Diumumkan pada SiRUP di Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi							
Realisasi Tahun 2021 - 2025					Target & Realisasi Tahun 2026			Renstra	
TW I Tahun 2021	TW I Tahun 2022	TW I Tahun 2023	TW I Tahun 2024	TW I Tahun 2025	Target TW I 2025	Realisasi TW I 2025	% Realisasi thd Target	Target Renstra	% terhadap Target Renstra
-	-	-	-	-	77	100	129,87%	77	129,87%

Data hasil perhitungan capaian indikator kinerja untuk prosentase Rencana Umum Pengadaan tahun 2026 prosentase RUP terumumkan mendapatkan nilai 100. hal ini didukung oleh Satuan kerja PPN Prigi telah melakukan identifikasi belanja pengadaan yang dituangkan ke dalam penyusunan kertas kerja sebagai data dukung pembentuk nilai pagu pengadaan yang selanjutnya dilakukan proses revisi RUP pada aplikasi SIRUP berdasarkan dokumen kertas kerja dimaksud. Hal ini bertujuan untuk mencegah terjadinya persentase pengumuman RUP pada aplikasi SIRUP melebihi atau kurang dari 100%. Data yang terbentuk pada dokumen kertas kerja untuk nilai Pagu Terumumkan merupakan nilai yang sama dengan nilai yang tercantum dalam rekap RUP Terumumkan pada aplikasi SIRUP, Dari hasil perhitungan dan olah data, dapat disampaikan secara keseluruhan satuan kerja lingkup KKP telah mencapai persentase RUP Terumumkan 100,00% pada periode penilaian capaian IKU Triwulan I Tahun Anggaran 2026. Paket RUP terumumkan PPN Prigi senilai 2.946.640.000 sama dengan data di statistik moner sebesar 2.946.640.000 sehingga tidak ada selisih antara pagu pengadaan dan paket RUP yang terumumkan artinya sudah sesuai. Pada Triwulan I Tahun 2025 data hasil perhitungan capaian indikator kinerja untuk prosentase Rencana Umum Pengadaan tahun 2025 prosentase RUP terumumkan mendapatkan nilai 100 sama dengan nilai RUP terumumkan Tiwulan I Tahun 2026.

Data hasil perhitungan capaian indikator kinerja untuk prosentase Rencana Umum Pengadaan tahun 2026 prosentase RUP terumumkan PPN Prigi mendapatkan nilai 100. hal ini sama dengan prosentase RUP terumumkan PPN Palabuhanratu yakni sebesar 100, sesuai dengan Nota Dinas Sekretariat Jenderal KKP Nomor : 283/SJ.7/PL.410/IV/2026 tanggal 7 April 2026 perihal Penyampaian Hasil Perhitungan Capaian Indikator Kinerja Persentase Rencana Umum Pengadaan di lingkungan KKP yang Diumumkan pada SIRUP Triwulan 1 Tahun Anggaran 2026.

Tabel 14. Hasil Penghitungan Persentase Rencana Umum Pengadaan Terumumkan di Lingkungan Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi Triwulan I 2026

Kertas Kerja Klarifikasi (File Excel)			Rekap RUP Terumumkan (Aplikasi SiRUP)		
RUP Eksisting	Nilai Identifikasi Efisiensi Belanja	RUP Pasca Revisi	Persentase RUP Terumumkan		
Pagu Terumumkan		Pagu Terumumkan	Selisih Kertas Kerja - SiRUP	Pagu Terumumkan	%
2.946.640.000	-	2.946.640.000	0	2.946.640.000	100

Faktor pendukung tercapainya indikator kinerja ini yaitu:

1. Adanya forum koordinasi baik lingkup Itjen maupun lingkup DJPT terkait proses prosentase RUP terumumkan setiap Triwulan yang selalu dipantau kesesuaian targetnya;
2. Tidak terlalu sering adanya revisi pagu anggaran sehingga pagu anggaran cenderung stabil nilainya sehingga tidak sering adanya perubahan di Aplikasi SIRUP;
3. Selalu konsisten terhadap perencanaan kegiatan dengan realisasi kegiatan selama tahun 2026. Program / kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan dalam pencapaian indikator kinerja ini yaitu layanan perkantoran.

Sedangkan faktor penghambat pelaksanaan indikator kinerja ini yaitu :

1. Pagu DIPA Awal sudah tidak sesuai dengan DIPA yang ada karena dilakukan revisi anggaran oleh Eselon 1 yang menyebabkan perubahan pagu sehingga berpengaruh terhadap pagu terumumkan pada Aplikasi SIRUP yang sudah di input dan upload pada Akhir Desember 2025;
2. Terdapat perubahan perubahan nilai pagu anggaran tiap kegiatan dikarenakan optimalisasi kegiatan yang sudah dilaksanakan sehingga menimbulkan selisih pagu kegiatan pengadaan dan RUP yang terumumkan sehingga secara berkala harus dilakukan penyesuaian pada Aplikasi SIRUP;

3. Masih terdapat pagu blokir efisiensi sehingga menyebabkan pagu pengadaan dan RUP terumumkan masih adanya selisih.

Adapun rencana tindak lanjut sebagai upaya dalam pencapaian kinerja ini adalah sebagai berikut :

1. Melakukan Perencanaan kegiatan dengan baik dan tepat sehingga tidak terlalu ada perubahan kegiatan dan anggaran pada saat pelaksanaan anggaran sehingga tidak sering melakukan perubahan pada Aplikasi SIRUP PBJ;
2. Selalu melakukan pengecekan pagu pengadaan dan pagu RUP terumumkan sehingga jika terjadi selisih segera untuk dilakukan updating data pada Aplikasi SIRUP;
3. Selalu update data realisasi pada aplikasi AMEL terkait pengadaan barang dan jasa sehingga segera dapat diketahui sisa pagu yang memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian di SIRUP nya

Indikator Kinerja (IK) 15 – Persentase Pengelolaan BMN di Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi

Persentase pengelolaan BMN merupakan suatu ukuran yang menggambarkan tingkat pengelolaan BMN lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap yang telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tingkat kepatuhan pengelolaan BMN di Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi diukur berdasarkan jumlah nilai dari beberapa unsur :

1. Tingkat pemanfaatan Rencana Kebutuhan BMN (RKBMN) (bobot 12,5%);
2. Tersedianya usulan penetapan status penggunaan BMN untuk pengadaan belanja modal yang sudah BAST (bobot 25%);
3. Tersedianya usulan penghapusan BMN untuk BMN dengan kondisi Rusak Berat baik ke pengguna barang dan pengelola barang (bobot 25%);
4. Penggunaan BMN hasil pengadaan belanja modal yang didukung Berita Acara Serah Terima (BAST) / Berita Acara Pemakaian (bobot 25%)
5. Penyusunan / penyampaian Laporan BMN (Semester dan Tahunan) secara tepat waktu (bobot 12,5%).

Pengukuran indikator kinerja ini bersifat tahunan, sehingga sampai dengan triwulan I tahun 2026 belum dapat dilakukan analisis dan evaluasi.

Indikator Kinerja (IK) 16 – Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi

Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi merupakan indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara / Lembaga atas kesesuaian antara perencanaan dengan pelaksanaan anggaran, efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi pelaksanaan anggaran dengan memperhitungkan 13 Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran.

Peraturan DJPB PER-4/PB/2021 tentang petunjuk teknis penilaian IKPA belanja K/L menggunakan PMK No.195/PMK 05 2018 tentang monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran belanja K/L, dengan bobot penilaian sebagai berikut : 1) Penyerapan Anggaran; 2) Data Kontrak; 3) Penyelesaian Tagihan; 4) Konfirmasi Capaian Output; 5) Pengelolaan UP dan TUP; 6) Revisi DIPA; 7) Deviasi Halaman 3 DIPA; 8) LPJ Bendahara; 9) Renkas; 10) Kesalahan SPM; 11) Retus SP2D; 12) Pagu Minus; 13) Dispensasi. Pengukuran indikator kinerja ini bersifat tahunan, sehingga sampai dengan triwulan I tahun 2026 belum dapat dilakukan analisis dan evaluasi.

Indikator Kinerja (IK) 17 – Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi

Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran adalah nilai yang dihasilkan atas kinerja perencanaan anggaran untuk tahun anggaran yang telah selesai untuk menyusun rekomendasi dalam rangka peningkatan kualitas perencanaan anggaran. Pengukuran dan evaluasi kinerja anggaran yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan dan Kementerian Negara / Lembaga atas perencanaan anggaran melalui aplikasi MONEV Kemenkeu. Berdasarkan KMK Nomor 466 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pengendalian dan Pemantauan serta Evaluasi Kinerja Anggaran terhadap Perencanaan Anggaran. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran dinilai berdasarkan aspek efektivitas dan efisiensi yang dihitung dengan menjumlahkan hasil perkalian capaian setiap indikator dengan bobot pada masing-masing indikator. Pengukuran indikator kinerja ini bersifat tahunan, sehingga sampai dengan triwulan I tahun 2026 belum dapat dilakukan analisis dan evaluasi.

Indikator Kinerja (IK) 18 – Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi

Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) merupakan kegiatan pengukuran secara komprehensif tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik (Permen PAN dan RB No.14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik).

Nilai SKM diukur dengan melihat hasil penghitungan 9 (sembilan) unsur pelayanan yang didapatkan dari seluruh unit penyelenggara pelayanan lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap (U1 Persyaratan Layanan, U2 Kemudahan Prosedur, U3 Waktu Penyelesaian, U4 Kesesuaian Biaya, U5 Kesesuaian Produk, U6 Kecepatan Respon, U7 Kemudahan Fitur/ Kemampuan Petugas, U8 Kualitas Isi/ Sarana, U9 Layanan Konsultasi). Hasil penghitungan diperoleh dari aplikasi SISUSAN KKP, yaitu aplikasi yang dikembangkan oleh PUSDATIN KKP sebagai tindak lanjut pengisian SKM di lingkup KKP.

Tabel 15. Capaian Indikator Kinerja Nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Triwulan I 2026

SK 5 Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik di Lingkungan Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi									
IK 18 Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi									
Realisasi Tahun 2021 - 2025					Target & Realisasi Tahun 2026			Renstra	
TW I Tahun 2021	TW I Tahun 2022	TW I Tahun 2023	TW I Tahun 2024	TW I Tahun 2025	Target TW I 2026	Realisasi TW I 2026	% Realisasi thd Target	Target Renstra	% terhadap Target Renstra
83	86	86,76	90,26	88,85	88,5	92,38	104,38%	88,5	104,38%

Capaian indikator kinerja Nilai Survei Kepuasan Masyarakat triwulan I 2026 sebesar 92,38 dengan kategori “Sangat Baik” atau 104,38% dari target triwulan I 2026. Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dilakukan secara periodik. Pelaksanaan SKM bertujuan untuk mendorong partisipasi masyarakat sebagai pengguna layanan dalam menilai kinerja penyelenggara pelayanan, mendorong penyelenggara pelayanan publik untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan menjadi lebih inovatif dalam menyelenggarakan pelayanan publik dan mengukur kecenderungan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik yang diberikan.

Berdasarkan hasil analisis Indeks Kepuasan Masyarakat triwulan I 2026, unsur dengan nilai tertinggi yaitu :

- Persyaratan Layanan

PPN Prigi telah menetapkan Standar Pelayanan (SP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP), dimana SP dan SOP tersebut telah memuat persyaratan dan alur

pelayanan sehingga memudahkan pengguna jasa dalam memahami pelaksanaan pelayanan.

- Kemudahan fitur/Kemampuan petugas

Untuk meningkatkan kompetensi dan kemampuan petugas, PPN prigi juga mendorong petugas pelayanan dalam mengikuti pelatihan dan bimtek baik luring maupun daring. Adapun kegiatan peningkatan kompetensi pada triwulan 1 antara lain pelatihan Garuda AI terkait penggunaan AI untuk kegiatan perkantoran, Bimtek perizinan berusaha subsector penangkapan dan pengangkutan ikan.

- Kualitas Isi/Sarana

Untuk melaksanakan pelayanan prima, diperlukan sarana dan prasarana penunjang. Pada triwulan 1 telah dilaksanakan perbaikan sarana dan prasarana penunjang antara lain peningkatan kualitas wifi dan pemasangan extender hdmi untuk ruang pelayanan. Peningkatan kualitas internet tersebut sangat membantu dalam pelaksanaan pelayanan penerbitan Sertifikat Kelaikan Kapal Perikanan, pelayanan penerbitan Persetujuan Berlayar, pelayanan penerbitan Sertifikat Hasil Tangkapan Ikan dan pelayanan tambat dan/atau labuh untuk kapal perikanan.

Sedangkan unsur layanan dengan nilai terendah berdasarkan hasil analisis indeks survey kepuasan masyarakat adalah :

- Kecepatan respon

Kecepatan respon merupakan salah satu unsur layanan dengan nilai yang rendah. Adapun pelayanan dengan nilai rendah pada unsur kecepatan respon ini adantara lain pelayanan air. Kendala tersebut terkait dengan kerusakan pompa sehingga pelayanan tidak bisa dilaksanakan dengan maksimal. Selain itu pelayanan dengan nilai rendah adalah pelayanan listrik dan penerbitan STBLKK, hal tersebut dikarenakan karena kurangnya jumlah petugas pelayanan.

- Layanan Konsultasi.

Layanan konsultasi merupakan salah satu unsur dengan penilaian rendah. Hal tersebut dikarenakan karena kurangnya sosialisasi media konsultasi di PPN Prigil Adapun pelayanan yang mendapatkan nilai terendah dalam unsur layanan konsultasi adalah pelayanan listrik dan pelayanan STBLK.

- Waktu penyelesaian

Pelayanan dengan nilai unsur sarana prasarana terendah yaitu pelayanan listrik, pelayanan air dan pelayanan STBLK. Waktu penyelesaian tersebut bisa juga terkait dengan kualitas sarana dan kompetensi petugas. Terkait dengan hal tersebut diperlukan monitoring dan evaluasi berkala untuk peningkatan nilai unsur waktu penyelesaian.

Perbandingan capaian nilai SKM triwulan I tahun 2022-2026 dapat dilihat pada Gambar dibawah ini.



Gambar 8. Perbandingan Nilai SKM Triwulan I Tahun 2022 – 2026

Capaian nilai SKM triwulan I 2026 merupakan capaian tertinggi dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Berdasarkan data 5 (lima) tahun terakhir, nilai SKM menunjukkan tren meningkat, namun mengalami penurunan di tahun 2026 sebesar 0,85%. Penurunan tersebut harus memacu PPN Prigi dalam meningkatkan kualitas pelayanan.

Jika dibandingkan dengan target Renstra, capaian indikator kinerja Nilai SKM triwulan I 2026 sebesar 104,38%. Sedangkan dibandingkan dengan capaian Satker lain (PPN Palabuhanratu), capaian triwulan I sebesar 100,02%, dimana capaian PPN Palabuhanratu sebesar 92,36

Faktor pendukung tercapainya indikator kinerja ini antara lain adanya perbaikan sarana dan prasarana, perbaikan kualitas pelayanan masyarakat, adanya tindak lanjut monev SKM serta masukan dan/atau saran dari pengguna jasa. Sedangkan faktor penghambat atau kendala dalam pencapaian indikator kinerja ini yaitu kurangnya pengetahuan pengguna jasa dalam pengisian SKM secara *online* sehingga sebagian besar pengisian masih menggunakan *form* SKM manual.

Upaya yang telah dilaksanakan pada triwulan I yaitu telah melaksanakan sosialisasi terkait biaya layanan dalam bentuk brosur dan leaflet di ruang pelayanan, pemasangan flyer SIPARI di ruang pelayanan sehingga mudah diakses pengguna jasa dan melaksanakan monitoring sarana dan prasarana secara berkala. Sedangkan rencana tindak lanjut untuk perbaikan nilai SKM adalah dengan melaksanakan monitoring dan

evaluasi terhadap kinerja petugas pelayanan dan melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pelayanan melalui kartu kendali SOP.

Dalam rangka mendukung keberhasilan pencapaian kinerja, diperlukan sumberdaya pendukung yang tepat dan efisien. Sumber daya pendukung meliputi 2 (dua) hal yaitu anggaran dan Sumber Daya Manusia (SDM). Terkait dukungan anggaran, pada tahun 2026 tidak ada anggaran pendukung kegiatan IKU ini. Sedangkan dari segi SDM, berdasarkan Surat Tugas Nomor B.18/PPN.PRG/KP.440/I/2026 tentang Petugas Pelayanan Publik pada Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi, SDM yang mendukung pencapaian indikator kinerja ini sebanyak 32 (tiga puluh dua) orang. Penggunaan aplikasi SISUSAN meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pelaksanaan SKM, baik dari segi waktu maupun SDM.

Program yang menunjang keberhasilan atau kegagalan pencapaian indikator kinerja ini yaitu program reformasi birokrasi melalui kegiatan koordinasi terkait peningkatan kualitas pelayanan publik.

3.3. Akuntabilitas Keuangan

Dukungan anggaran untuk pelaksanaan kegiatan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi Tahun Anggaran 2026 sesuai dengan DIPA Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi Nomor T.A. 2026 dengan nomor : SP DIPA 032.03.2.427670/2026 tanggal 01 Desember 2025 adalah Rp 13.454.440.000,00 (Pagu sebelum blokir). Adanya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 tahun 2025 tentang upaya efisiensi anggaran pada APBN tahun 2025, berpengaruh terhadap jumlah anggaran di Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi yang berubah menjadi Rp 12.440.950,00 (Pagu setelah blokir). Anggaran tersebut dibagi dalam 2 (tiga) kegiatan utama sebagai berikut :

1. Pengelolaan Pelabuhan Perikanan
2. Dukungan Manajemen Internal Lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap

Capaian pelaksanaan anggaran sampai dengan triwulan I 2026 sebesar Rp 2.842.557.810,00 atau sebesar 22.85% dari total Pagu Anggaran T.A. 2026.

Tabel 16. Realisasi Anggaran berdasarkan Pelaksanaan Kegiatan Utama Triwulan I 2025

No	Program / Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	% Realisasi Anggaran
1	Pengelolaan Pelabuhan Perikanan	389.093.000	43.057.804	11.07 %
3	Dukungan Manajemen Internal	12.051.857.000	2.799.500.006	23.23%
Jumlah (Rp)		12.440.950.000	2.842.557.810	22.85%

Target anggaran yang ditetapkan direncanakan untuk menghasilkan capaian kinerja yang telah ditetapkan. Realisasi anggaran merupakan jumlah anggaran yang terealisasi untuk menghasilkan capaian target yang telah ditetapkan. Penyerapan anggaran berdasarkan Sasaran Kegiatan triwulan I 2026 dapat dilihat pada Tabel dibawah ini.

Tabel 17. Realisasi Anggaran berdasarkan Sasaran Kegiatan Triwulan I 2025

No	Program / Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	% Realisasi Anggaran
1	Nilai PNBP Sektor Perikanan Tangkap Meningkat di Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi	113.384.000	-	-
2	Produktivitas Perikanan Tangkap di Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi Meningkat	-	-	-
3	Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi yang Optimal dan Bertanggung Jawab	115.184000	-	-
4	Pengelolaan Awak Kapal Perikanan, Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan Berkelanjutan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi	-	-	-
5	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik di Lingkungan Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi	10.810.468.000	2.881.470.798	26,65%
Jumlah (Rp)		11.039.056.000	2.881.470.798	26,10%



BAB IV PENUTUP

BAB IV. PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Dalam mewujudkan pengelolaan perikanan yang berkelanjutan, Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan perencanaan dan anggaran yang telah direncanakan. Berdasarkan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan selama tahun 2026, Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi telah menunjukkan kinerja yang terukur.

Laporan Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi Triwulan I 2026 menyajikan berbagai keberhasilan maupun kendala dalam mencapai sasaran program dan target pada indikator kinerja selama periode Triwulan I 2026. Terhadap capaian indikator kinerja tersebut dilakukan analisis dan evaluasi, serta membandingkan dengan target triwulan, tahunan, capaian tahun sebelumnya, target Renstra, dan capaian nasional dan/atau capaian Satker lain yang memiliki karakter hampir sama sebagai bahan analisis dan evaluasi lebih lanjut untuk menilai keberhasilan. Indikator kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi periode triwulan I 2025 secara keseluruhan dinyatakan tercapai.

Pada triwulan I 2026, Nilai Capaian Sasaran Strategis (NPSS) Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi sebesar 111,64% dengan kategori ISTIMEWA. Berdasarkan Perjanjian Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi Tahun 2025, terdapat 5 (lima) Sasaran Kegiatan dengan 18 (delapan belas) Indikator Kinerja. Sedangkan berdasarkan Manual Indikator Kinerja (Manual IKU), menurut sifat pengukuran capainnya, terdapat 8 (delapan) indikator kinerja bersifat triwulan, 3 (tiga) indikator kinerja bersifat semester, dan 7 (tujuh) indikator kerja bersifat tahun. Pada triwulan I 2025, keseluruhan indikator kinerja dengan pengukuran triwulan (8 indikator kinerja) tercapai (capaian $\geq 100\%$).

Dalam pelaksanaan pencapaian indikator kinerja, terdapat beberapa kendala dan permasalahan. Adapun permasalahan yang dihadapi antara lain :

- Perlu adanya upaya kontrol atas transaksi dan menciptakan keselarasan data PNBP;
- Capaian masing-masing indikator Evaluasi Kinerja Pelabuhan bersifat fluktuatif;
- Capaian masing-masing indikator SELARASKAN bersifat fluktuatif;
- Pengetahuan tim pengelola kinerja perlu ditingkatkan dan/atau *updated*.

Hal tersebut menunjukkan perlu upaya yang lebih besar untuk dapat mencapai seluruh target yang ditetapkan pada periode selanjutnya. Upaya-upaya dimaksud disampaikan pada langkah-langkah perbaikan.

4.2. Tindak Lanjut Periode Sebelumnya

Terdapat 8 (delapan) rekomendasi perbaikan pada periode sebelumnya (triwulan IV 2025). Seluruh rekomendasi telah ditindaklanjuti pada periode triwulan I 2026. Adapun rekomendasi periode sebelumnya yaitu :

- Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap kapal yang beroperasi agar tetap memenuhi ketentuan keselamatan dan kelengkapan dokumen;
- Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengendalian lingkungan;
- Meningkatkan kegiatan sosialisasi kepada pelaku usaha terkait pembuatan PKL dan kepesertaan BPJS ketenagakerjaan bagi awak kapal secara bertahap dan berkelanjutan;
- Menyusun program kerja agen perubahan yang berdampak luas ke stakeholder;
- Melakukan pemantauan dan rapat evaluasi realisasi anggaran secara berkala untuk mendeteksi dan menindaklanjuti penyimpangan sejak dini dan melaksanakan akselerasi pelaksanaan pertanggungjawaban tepat waktu;
- Melaksanakan sosialisasi terkait kesesuaian biaya (tarif pelayanan);

4.3. Rekomendasi Tindak Lanjut

Berdasarkan pembahasan pencapaian indikator kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi triwulan I 2026, rekomendasi / hal-hal yang disarankan untuk peningkatan kinerja guna pencapaian target periode selanjutnya sebagai berikut :

- Melaksanakan kegiatan rekonsiliasi petugas pelayanan jasa dengan bendahara penerimaan;
- Melaksanakan monitoring dan evaluasi capaian evaluasi kinerja pelabuhan perikanan;
- Melaksanakan monitoring dan evaluasi SELARASKAN;